

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
(LKPP)**

**Nota Dinas**

Nomor : 33101/Ses.1/11/2023

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Oktober 2023  
Tanggal : 24 November 2023

Sehubungan dengan masa penyampaian laporan bulanan untuk periode bulan Oktober 2023 oleh setiap Unit Organisasi Eselon II yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa pemutakhiran data pada aplikasi Krisna Bappenas dan aplikasi SAKTI Kemenkeu sampai dengan saat ini masih berproses, dan sehubungan dengan belum berubahnya indikator dan target kinerja yang terdapat dalam aplikasi E-Monev dan aplikasi SMART maka indikator dan target kinerja yang dilaporkan pada bulan Oktober 2023 belum menggunakan indikator dan target yang ditetapkan sebagaimana pada dokumen perubahan Renstra berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024. Indikator dan target yang ditetapkan pada dokumen perubahan Renstra sudah dapat dilaporkan pada laporan periode bulan November 2023.
2. Pagu anggaran awal LKPP tahun 2023 sebesar Rp200.222.132.000. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu RI nomor S-456/AG/AG.4/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Hal Pengesahan Revisi Anggaran LKPP TA 2023 (Revisi ke-6/Realokasi *Automatic Adjustment*) pagu LKPP di bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp187.144.450.000.
3. Berdasarkan point 2 di atas penyerapan LKPP (kumulatif) sampai dengan bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp126.670.101.011 (67,69%). Realisasi anggaran (parsial) sebesar Rp11.446.131.367, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan Oktober 2023 sebesar 16.677.098.306 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp5,230,966,939 atau -31.37%.
4. Sampai dengan bulan Oktober 2023, LKPP telah membuat kontrak/komitmen sebanyak 103 paket dengan total nilai kontrak yaitu sebesar Rp35.100.577.025 dimana terdapat 72 kontrak yang telah selesai dibayarkan sehingga masih terdapat 31 kontrak dengan nilai sisa sebesar Rp2.994.549.258.
5. Pada tahun 2023 pagu pengadaan LKPP sebesar Rp132.585.288.000 (71%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 4 November 2023, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp130,179,823,710 atau sebesar 89,90%. Masih terdapat Rp14,633,146,290 (8,46%) yang belum diumumkan melalui aplikasi SiRUP.
6. Nilai IKPA LKPP bulan Oktober 2023 berdasarkan Aplikasi OMSPAN ([spanint.kemenkeu.go.id](https://spanint.kemenkeu.go.id)) adalah sebesar 93,82 dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan 22 November 2023 adalah sebesar 69,94 nilai tersebut termasuk kedalam kategori Cukup.
7. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
  - b. Mencermati dan segera meng-update pengumuman RUP di SiRUP untuk unit organisasi yang



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

- penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaan;
- c. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan komponen);
  - d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan
  - e. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Oktober 2023.
8. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang secara lebih lengkap beserta rekomendasinya dapat dilihat pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Oktober 2023 (sebagaimana terlampir).
9. Dalam hal membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa (0819-3209-6526) atau Sdri. Agita (0878-7839-6621).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*  
**Iwan Herniwan**

Tembusan :  
Plt. Sekretaris Utama



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

# **LAPORAN MONITORING & EVALUASI KINERJA UNIT ORGANISASI OKTOBER 2023**

Biro Perencanaan dan Keuangan  
Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

# SUMMARY

## CAPAIAN FISIK LEMBAGA



### Sasaran Strategis

LKPP Mempunyai 2 Tujuan dengan 8 Indikator



### Sasaran Kegiatan

LKPP Memiliki 35 Sasaran Kegiatan dengan 53 Indikator



### Rincian Output

LKPP Memiliki 69 Rincian Output

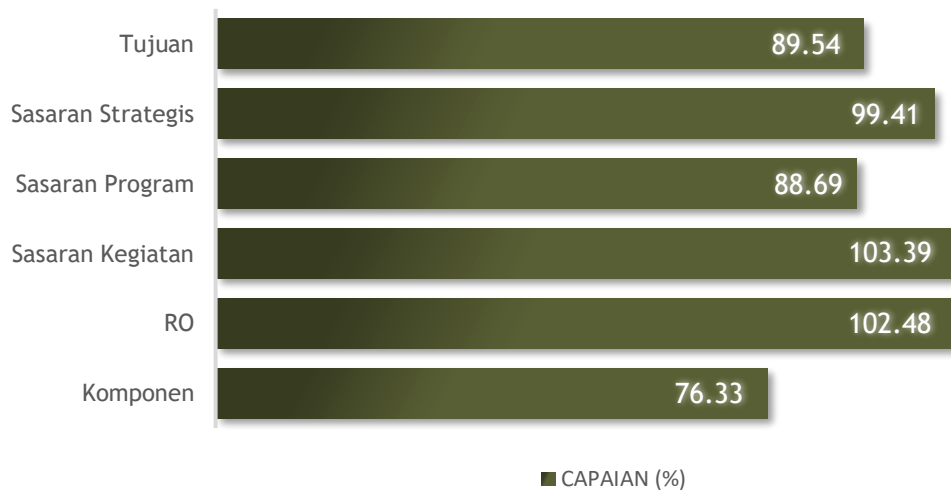


### Komponen

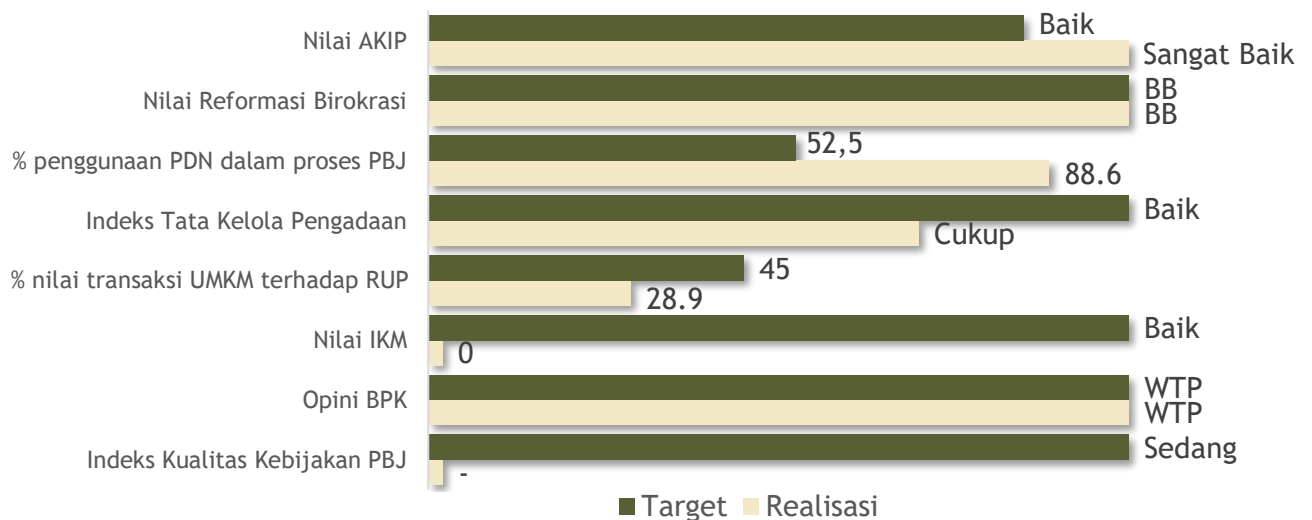
LKPP Memiliki 202 Komponen dari 69 Rincian Output



### Capaian Fisik



### Sasaran Strategis

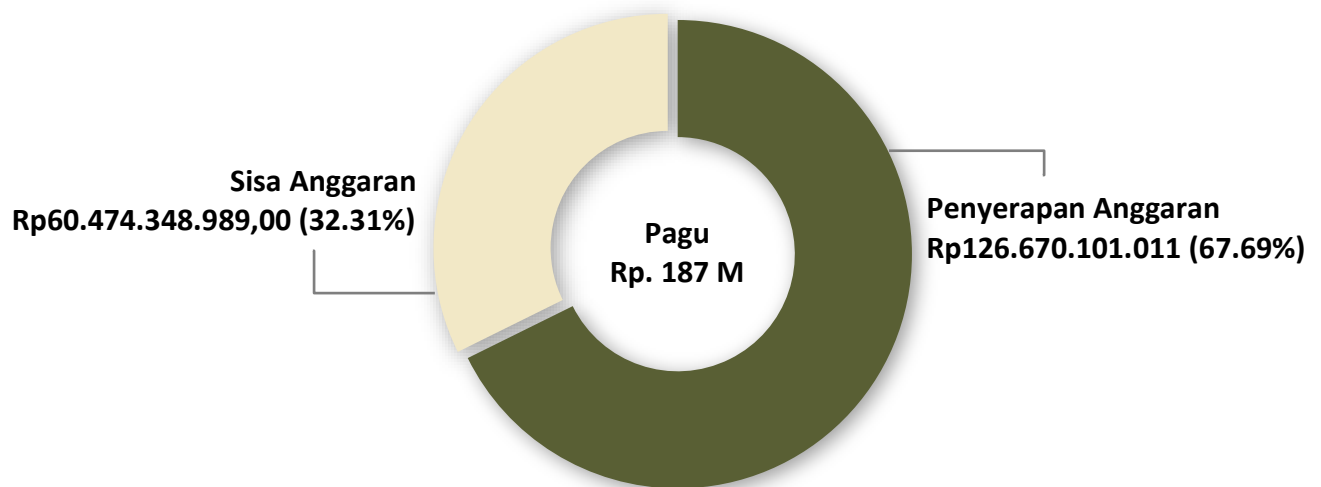


# SUMMARY

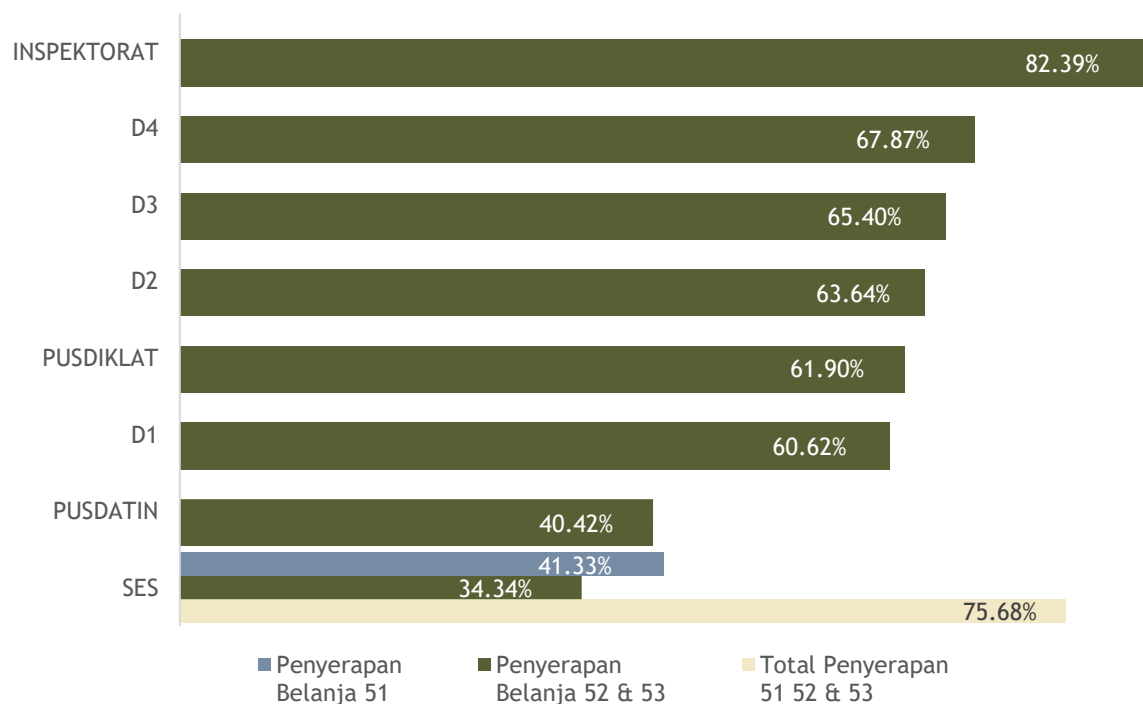
## PENYERAPAN ANGGARAN



Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2023 berdasarkan aplikasi MonSAKTI



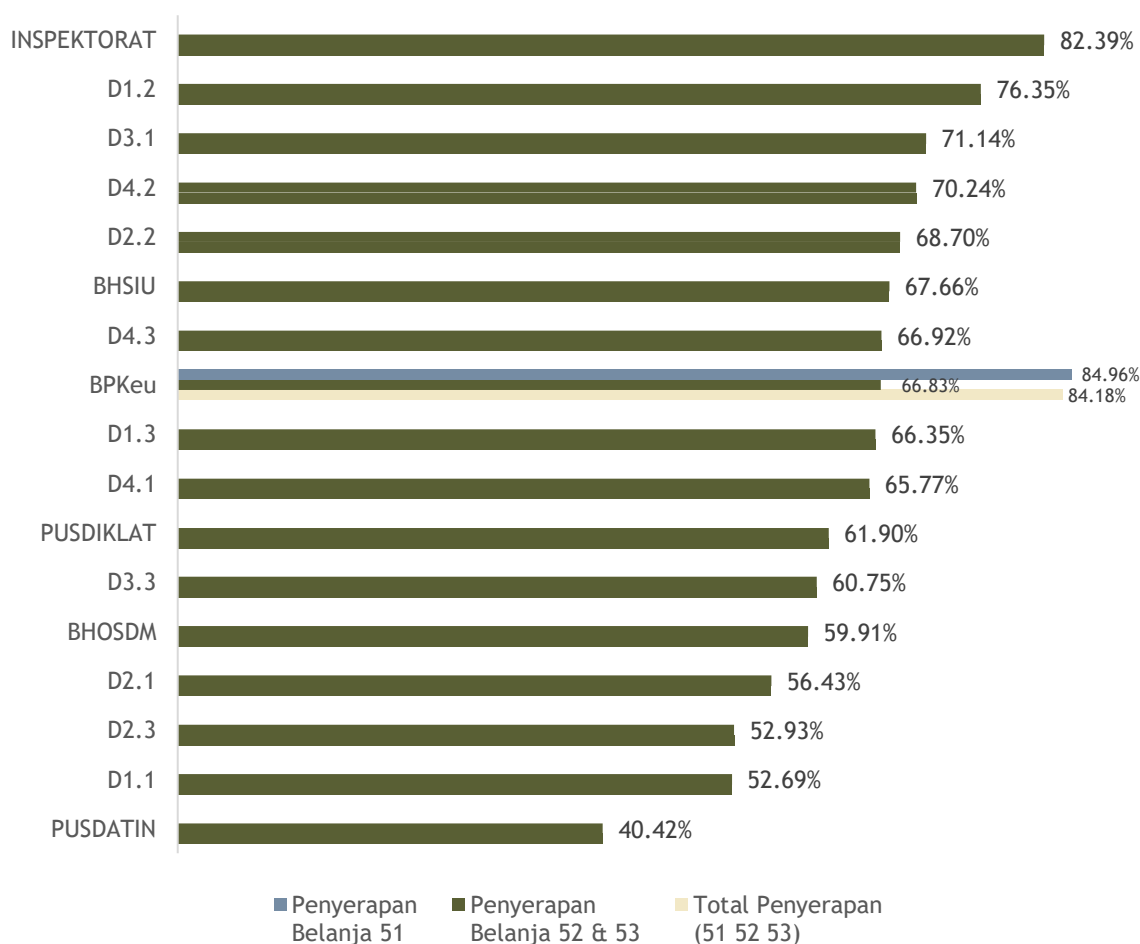
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. I dan Unor Es. II Mandiri TA 2023 berdasarkan aplikasi MonSAKTI



Berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar terdapat pada Inspektorat (82.39% - Rp547,982,364) dan terkecil terdapat pada Sestama (34,34% - Rp38,514,309,947).



## Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. II



Berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar terdapat pada Inspektorat (82.39% - Rp1,261,962,525) dan terkecil terdapat pada Pusat Data dan Informasi (40.42% - Rp2,250,534,936).

# PERBANDINGAN

## RENCANA PENARIKAN DANA (RPD)

### DENGAN REALISASI ANGGARAN

| No.        | Unit Organisasi         | RPD Oktober (Rp) | Realisasi Anggaran Oktober (Rp) | Deviasi (Rp)    | % Deviasi* |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| (1)        | (2)                     | (3)              | (4)                             | (5)             | (6)        |
|            |                         |                  |                                 | (4) – (3)       | (5) / (3)  |
| 1          | BHOSDM                  | 751.567.911      | 233.672.750                     | (517.895.161)   | -68,91%    |
| 2          | BHU                     | 3.529.375.329    | 3.085.738.033                   | (443.637.296)   | -12,57%    |
| 3          | BPKEU                   | 165.424.620      | 150.878.532                     | (14.546.088)    | -8,79%     |
| 4          | BPKEU (Belanja Pegawai) | 3.878.058.840    | 3.881.351.831                   | 3.292.991       | 0,08%      |
| 5          | D1.1                    | 725.819.482      | 230.014.169                     | (495.805.313)   | -68,31%    |
| 6          | D1.2                    | 216.241.396      | 23.833.348                      | (192.408.048)   | -88,98%    |
| 7          | D1.3                    | 241.540.150      | 105.972.383                     | (135.567.767)   | -56,13%    |
| 8          | D2.1 (Monev)            | 542.560.994      | 303.588.275                     | (238.972.719)   | -44,05%    |
| 9          | D2.2 (SPSE)             | 1.884.353.579    | 1.355.747.554                   | (528.606.025)   | -28,05%    |
| 10         | D2.3 (Katalog)          | 1.349.824.750    | 551.225.589                     | (798.599.161)   | -59,16%    |
| 11         | D3.1                    | 322.306.501      | 127.812.939                     | (194.493.562)   | -60,34%    |
| 12         | D3.3                    | 811.816.041      | 173.158.904                     | (638.657.137)   | -78,67%    |
| 13         | D4.1                    | 175.206.398      | 78.702.139                      | (96.504.259)    | -55,08%    |
| 14         | D4.2                    | 68.009.800       | 74.510.029                      | 6.500.229       | 9,56%      |
| 15         | D4.3                    | 163.792.470      | 76.025.625                      | (87.766.845)    | -53,58%    |
| 16         | INSPEKTORAT             | 45.091.472       | 56.365.596                      | 11.274.124      | 25,00%     |
| 17         | PUSDATIN                | 1.200.406.775    | 737.519.176                     | (462.887.599)   | -38,56%    |
| 18         | PPSDM PBJ               | 605.701.798      | 200.014.495                     | (405.687.303)   | -66,98%    |
| TOTAL LKPP |                         | 16,677,098,306   | 11.446.131.367                  | (5.230.966.939) | -31,37%    |

Catatan:

- \* 1. Ambang batas deviasi antara RPD dengan realisasi adalah sebesar  $\pm 5\%$  untuk nilai maksimum IKPA LKPP;
- 2. Kinerja Unit Organisasi semakin baik bila Persentase Deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran mendekati 0%.
- 3. Persentase Deviasi bernilai positif (+) jika Realisasi Anggaran lebih besar dari RPD
- 4. Persentase Deviasi bernilai negatif (-) jika Realisasi Anggaran lebih kecil dari RPD
- 5. Realisasi Anggaran (4) yang ditampilkan merupakan penyerapan anggaran parsial bulan Oktober tahun 2023

Realisasi anggaran diluar ambang batas toleransi deviasi sebesar  $\pm 5\%$

Realisasi anggaran masih dalam ambang batas toleransi deviasi sebesar  $\pm 5\%$

## DAFTAR ISI

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Summary .....                                                                    | 2  |
| Daftar Isi.....                                                                  | 6  |
| Bab I Monitoring dan Evaluasi Lembaga.....                                       | 9  |
| 1.1 Anggaran .....                                                               | 9  |
| A. Pagu Anggaran .....                                                           | 9  |
| B. Penyerapan Anggaran.....                                                      | 10 |
| 1.2 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa .....                          | 11 |
| 1.3 Komitmen/Kontrak .....                                                       | 13 |
| 1.4 Pelaporan Eksternal .....                                                    | 15 |
| A. Nilai Kinerja Dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan .....             | 15 |
| B. Pelaporan Kinerja Pada E-Monev Bappenas .....                                 | 17 |
| Bab II Monitoring Dan Evaluasi Unit Organisasi .....                             | 18 |
| 2.1 Biro Perencanaan Dan Keuangan (BPKEU) .....                                  | 18 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                   | 18 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                 | 19 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                          | 19 |
| D. Rekomendasi .....                                                             | 20 |
| 2.2 Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM).....                 | 21 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                   | 21 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                 | 22 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                          | 22 |
| D. Rekomendasi .....                                                             | 22 |
| 2.3 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU).....                                 | 24 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                   | 24 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                 | 25 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                          | 25 |
| D. Rekomendasi .....                                                             | 25 |
| 2.4 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) .....   | 26 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                   | 26 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                 | 27 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                          | 28 |
| D. Rekomendasi .....                                                             | 28 |
| 2.5 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) ..... | 29 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                   | 29 |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                     | 30 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                              | 31 |
| D. Rekomendasi .....                                                                 | 31 |
| 2.6 Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3) .....     | 32 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                       | 32 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                     | 33 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                              | 33 |
| D. Rekomendasi .....                                                                 | 33 |
| 2.7 Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) . | 35 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                       | 35 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                     | 36 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                              | 36 |
| D. Rekomendasi .....                                                                 | 37 |
| 2.8 Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) .....                                 | 39 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                       | 39 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                     | 40 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                              | 40 |
| D. Rekomendasi .....                                                                 | 41 |
| 2.9 Direktorat Sistem Pasar Digital Pengadaan (D2.3) .....                           | 43 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                       | 43 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                     | 44 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                              | 44 |
| D. Rekomendasi .....                                                                 | 45 |
| 2.10 Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1).....                     | 46 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                       | 46 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                     | 47 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                              | 47 |
| D. Rekomendasi .....                                                                 | 48 |
| 2.11 Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) .....                                     | 49 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                       | 49 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                                                     | 50 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                                              | 50 |
| D. Rekomendasi .....                                                                 | 51 |
| 2.12 Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1).....                                | 52 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                                                       | 52 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                           | 53 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                    | 53 |
| D. Rekomendasi .....                                       | 53 |
| 2.13 Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) .....    | 54 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                             | 54 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                           | 55 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                    | 56 |
| D. Rekomendasi .....                                       | 57 |
| 2.14 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) ..... | 58 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                             | 58 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                           | 60 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                    | 60 |
| D. Rekomendasi .....                                       | 60 |
| 2.15 Inspektorat .....                                     | 61 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                             | 61 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                           | 62 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                    | 63 |
| D. Rekomendasi .....                                       | 63 |
| 2.16 Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa .....       | 63 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                             | 63 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                           | 64 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                    | 64 |
| D. Rekomendasi .....                                       | 65 |
| 2.17 Pusat Data dan Informasi.....                         | 66 |
| A. Capaian Kinerja Fisik .....                             | 66 |
| B. Capaian Kinerja Anggaran.....                           | 67 |
| C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....                    | 67 |
| D. Rekomendasi .....                                       | 67 |
| Bab III Kesimpulan.....                                    | 69 |

## BAB I

### MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

#### 1.1 ANGGARAN

##### A. Pagu Anggaran

Pagu anggaran awal LKPP tahun 2023 sebesar Rp200.222.132.000. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu RI nomor S-456/AG/AG.4/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Hal Pengesahan Revisi Anggaran LKPP TA 2023 (Revisi ke-6/Realokasi *Automatic Adjustment*) pagu LKPP di bulan Oktober 2023 adalah sebesar **Rp187.144.450.000**. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)              | %             |
|--------------------|------------------------|---------------|
| 51 Belanja Pegawai | 54.559.162.000         | 78.13%        |
| 52 Belanja Barang  | 115.903.116.000        | 61.43%        |
| 53 Belanja Modal   | 16.682.172.000         | 77.03%        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>187.144.450.000</b> | <b>67.69%</b> |

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi LKPP berdasarkan revisi anggaran ke-20 adalah sebagai berikut:

| Unit Organisasi          | 51 Belanja Pegawai (Rp) | 52 Belanja Barang (Rp) | 53 Belanja Modal (Rp) | TOTAL PAGU (Rp)       |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SETTAMA</b>           | <b>54.559.162.000</b>   | <b>51.327.860.000</b>  | <b>6.261.201.000</b>  | <b>57.589.061.000</b> |
| BHOSDM                   | -                       | 5.548.887.000          | -                     | 5.548.887.000         |
| BPKeu                    | -                       | 2.469.626.000          | -                     | 2.469.626.000         |
| BHU                      | -                       | 43.309.347.000         | 6.261.201.000         | 49.570.548.000        |
| BPKeu (Belanja Pegawai)  | 54.559.162.000          | -                      | -                     | 54.559.162.000        |
| <b>Kedeputian 1 (D1)</b> | <b>-</b>                | <b>7.649.085.000</b>   | <b>-</b>              | <b>7.649.085.000</b>  |
| D1.1                     | -                       | 4.416.185.000          | -                     | 4.416.185.000         |
| D1.2                     | -                       | 1.652.800.000          | -                     | 1.652.800.000         |
| D1.3                     | -                       | 1.580.100.000          | -                     | 1.580.100.000         |
| <b>Kedeputian 2 (D2)</b> | <b>-</b>                | <b>35.410.053.000</b>  | <b>8.661.825.000</b>  | <b>44.071.878.000</b> |
| D2.1                     | -                       | 3.243.165.000          | -                     | 3.243.165.000         |
| D2.2                     | -                       | 21.287.259.000         | 7.920.325.000         | 29.207.584.000        |
| D2.3                     | -                       | 10.879.629.000         | 741.500.000           | 11.621.129.000        |
| <b>Kedeputian 3 (D3)</b> | <b>-</b>                | <b>7.066.927.000</b>   | <b>-</b>              | <b>7.066.927.000</b>  |
| D3.1                     | -                       | 3.163.415.000          | -                     | 3.163.415.000         |
| D3.3                     | -                       | 3.903.512.000          | -                     | 3.903.512.000         |
| <b>Kedeputian 4 (D4)</b> | <b>-</b>                | <b>4.190.465.000</b>   | <b>-</b>              | <b>4.190.465.000</b>  |
| D4.1                     | -                       | 1.027.600.000          | -                     | 1.027.600.000         |

| Unit Organisasi | 51 Belanja Pegawai<br>(Rp) | 52 Belanja Barang<br>(Rp) | 53 Belanja Modal<br>(Rp) | TOTAL PAGU<br>(Rp) |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| D4.2            | -                          | 1.552.865.000             | -                        | 1.552.865.000      |
| D4.3            | -                          | 1.610.000.000             | -                        | 1.610.000.000      |
| INSPEKTORAT     | -                          | 665.080.000               | -                        | 665.080.000        |
| PUSLAT          | -                          | 3.482.086.000             | 507.946.000              | 3.990.032.000      |
| PUSDATIN        | -                          | 665.080.000               | 1.251.200.000            | 7.362.760.000      |
| TOTAL           | 54.559.162.000             | 115.903.116.000           | 16.682.172.000           | Rp187.144.450.000  |

## B. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar **Rp126.670.101.011** atau sebesar **67,69%**. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)       | Realisasi       |        | Sisa Anggaran (Rp) |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
|                    |                 | Nominal (Rp)    | %      |                    |
| 51 Belanja Pegawai | 54.559.162.000  | 42.624.878.339  | 78,13% | 11.934.283.661     |
| 52 Belanja Barang  | 115.903.116.000 | 71.195.096.940  | 61,43% | 44.708.019.060     |
| 53 Belanja Modal   | 16.682.172.000  | 12.850.125.732  | 77,03% | 3.832.046.268      |
| Total              | 187.144.450.000 | 126.670.101.011 | 67,69% | Rp60.474.348.989   |

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

| Unit Organisasi | Pagu (Rp)      | Realisasi      |        | Sisa Anggaran (Rp) |
|-----------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
|                 |                | Nominal (Rp)   | %      |                    |
| Belanja Pegawai | 54.559.162.000 | 42.624.878.339 | 78,13% | 11.934.283.661     |
| SES             | 57.627.939.000 | 38.296.050.119 | 66,45% | 19.331.888.881     |
| D2              | 44.071.878.000 | 27.798.630.433 | 63,08% | 16.273.247.567     |
| D1              | 7.649.085.000  | 4.612.906.893  | 60,31% | 3.036.178.107      |
| D3              | 7.066.927.000  | 4.522.412.671  | 63,99% | 2.544.514.329      |
| PUSDATIN        | 7.323.882.000  | 2.976.274.760  | 40,64% | 4.347.607.240      |
| D4              | 4.190.465.000  | 2.821.314.082  | 67,33% | 1.369.150.918      |
| PUSLAT          | 3.990.032.000  | 2.469.651.350  | 61,90% | 1.520.380.650      |
| INSPEKTORAT     | 665.080.000    | 547.982.364    | 82,39% | 117.097.636        |

|              |                        |                        |               |                       |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>187.144.450.000</b> | <b>126.670.101.011</b> | <b>67,69%</b> | <b>60.474.348.989</b> |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

| Unit Organisasi | Pagu (Rp)              | Realisasi              |               | Sisa Anggaran (Rp)    |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|                 |                        | Nominal (Rp)           | %             |                       |
| BPKeu (Gaji)    | 54.559.162.000         | 42.624.878.339         | 78,13%        | 11.934.283.661        |
| BHU             | 49.609.426.000         | 33.336.955.203         | 67,20%        | 16.272.470.797        |
| D2.2            | 29.207.584.000         | 20.024.610.563         | 68,56%        | 9.182.973.437         |
| D2.3            | 11.621.129.000         | 6.082.560.643          | 52,34%        | 5.538.568.357         |
| BHOSDM          | 5.548.887.000          | 3.313.594.027          | 59,72%        | 2.235.292.973         |
| PUSDATIN        | 7.323.882.000          | 2.976.274.760          | 40,64%        | 4.347.607.240         |
| PUSLAT          | 3.990.032.000          | 2.469.651.350          | 61,90%        | 1.520.380.650         |
| D1.1            | 4.416.185.000          | 2.326.763.150          | 52,69%        | 2.089.421.850         |
| D3.3            | 3.903.512.000          | 2.290.717.735          | 58,68%        | 1.612.794.265         |
| D3.1            | 3.163.415.000          | 2.231.694.936          | 70,55%        | 931.720.064           |
| D2.1            | 3.243.165.000          | 1.691.459.227          | 52,15%        | 1.551.705.773         |
| BPKeu           | 2.469.626.000          | 1.645.500.889          | 66,63%        | 824.125.111           |
| D1.2            | 1.652.800.000          | 1.237.762.525          | 74,89%        | 415.037.475           |
| D4.3            | 1.610.000.000          | 1.077.448.974          | 66,92%        | 532.551.026           |
| D4.2            | 1.552.865.000          | 1.068.044.464          | 68,78%        | 484.820.536           |
| D1.3            | 1.580.100.000          | 1.048.381.218          | 66,35%        | 531.718.782           |
| D4.1            | 1.027.600.000          | 675.820.644            | 65,77%        | 351.779.356           |
| INSPEKTORAT     | 665.080.000            | 547.982.364            | 82,39%        | 117.097.636           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>187.144.450.000</b> | <b>126.670.101.011</b> | <b>67,69%</b> | <b>60.474.348.989</b> |

## 1.2 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Berdasarkan revisi anggaran ke-20 pagu pengadaan LKPP adalah sebesar Rp132.585.288.000 (71%) dari pagu total LKPP. Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 4 Oktober 2023, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp130.179.823.710 atau sebesar 89,90% yang terdiri dari:

| Jenis Pengadaan      | Jumlah Paket | Total Pagu Paket (Rp)    | %             |
|----------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Jasa Lainnya         | 508          | Rp62.431.993.510         | <b>43,11%</b> |
| Barang               | 303          | Rp24.324.679.200         | <b>16,80%</b> |
| Jasa Konsultansi     | 53           | 12.374.210.000           | <b>8,54%</b>  |
| Pekerjaan Konstruksi | 3            | Rp1.298.062.000          | <b>0,90%</b>  |
| Swakelola            | 347          | Rp32.126.305.000         | <b>22,18%</b> |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1214</b>  | <b>Rp132.555.249.710</b> | <b>91,54%</b> |

| Metode Pemilihan    | Jumlah Paket | Total Pagu Paket (Rp)    | %             |
|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Pengadaan Langsung  | 538          | Rp37.473.462.200         | <b>25,88%</b> |
| Tender              | 10           | Rp17.166.067.510         | <b>11,85%</b> |
| e-Purchasing        | 214          | Rp28.702.137.000         | <b>19,82%</b> |
| Penunjukan Langsung | 17           | Rp11.280.014.000         | <b>7,79%</b>  |
| Seleksi             | 9            | Rp2.017.860.000          | <b>1,39%</b>  |
| Dikecualikan        | 79           | Rp3.789.404.000          | <b>2,62%</b>  |
| Swakelola           | 347          | Rp32.126.305.000         | <b>22,18%</b> |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1214</b>  | <b>Rp132.555.249.710</b> | <b>91,54%</b> |

Adapun progres penayangan paket pengadaan barang/jasa per Unit Organisasi Eselon II adalah sebagai berikut (dalam juta rupiah):

| Unit Organisasi Eselon II | Pagu Pengadaan | Penyedia |           | Swakelola |          | Penyedia Dalam Swakelola |          | Total Paket |           | Persentase Penayangan |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------|--------------------------|----------|-------------|-----------|-----------------------|
|                           |                | Jml      | Rp        | Jml       | Rp       | Jml                      | Rp       | Jml         | Rp        |                       |
| <b>BHOSDM</b>             | 5.548,89       | 83       | 3.486,70  | 36        | 2.465,93 | 0                        | 0,00     | 119         | 5.952,63  | <b>107,28%</b>        |
| <b>BHU</b>                | 49.609,43      | 135      | 41.135,63 | 38        | 3.886,95 | 0                        | 0,00     | 173         | 45.022,58 | <b>90,75%</b>         |
| <b>BPKeu</b>              | 2.469,63       | 0        | 0,00      | 10        | 1.221,18 | 20                       | 1.379,12 | 30          | 2.600,30  | <b>105,29%</b>        |
| <b>D1.1</b>               | 4.416,19       | 2        | 295,00    | 44        | 2.927,40 | 6                        | 333,70   | 52          | 3.556,10  | <b>80,52%</b>         |
| <b>D1.2</b>               | 1.652,80       | 0        | 0,00      | 10        | 387,30   | 32                       | 1.265,51 | 42          | 1.652,80  | <b>100,00%</b>        |
| <b>D1.3</b>               | 1.580,10       | 0        | 0,00      | 12        | 1.274,70 | 6                        | 325,80   | 18          | 1.600,50  | <b>101,29%</b>        |

| Unit Organisasi<br>Eselon II | Pagu<br>Pengadaan | Penyedia |           | Swakelola |           | Penyedia Dalam<br>Swakelola |           | Total Paket |            | Persentase<br>Penayangan |
|------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------------|
|                              |                   | Jml      | Rp        | Jml       | Rp        | Jml                         | Rp        | Jml         | Rp         |                          |
| D2.1                         | 3.243,17          | 71       | 2.652,29  | 24        | 887,41    | 0                           | 0,00      | 95          | 3.539,70   | 109,14%                  |
| D2.2                         | 29.207,58         | 101      | 28.037,36 | 37        | 6.112,54  | 0                           | 0,00      | 138         | 34.149,90  | 116,92%                  |
| D2.3                         | 11.621,13         | 36       | 4.462,37  | 28        | 7.052,81  | 0                           | 0,00      | 64          | 11.515,18  | 99,09%                   |
| D3.1                         | 3.163,42          | 0        | 0,00      | 11        | 1.071,01  | 56                          | 2.238,91  | 67          | 3.309,92   | 104,63%                  |
| D3.3                         | 3.903,51          | 0        | 0,00      | 17        | 1.145,73  | 80                          | 2.940,78  | 97          | 4.086,50   | 104,69%                  |
| D4.1                         | 1.027,60          | 4        | 246,99    | 9         | 169,21    | 20                          | 611,41    | 33          | 1.027,60   | 100,00%                  |
| D4.2                         | 1.552,87          | 0        | 0,00      | 6         | 271,25    | 44                          | 1.281,62  | 50          | 1.552,87   | 100,00%                  |
| D4.3                         | 1.610,00          | 13       | 157,91    | 5         | 367,99    | 38                          | 900,04    | 56          | 1.425,93   | 88,57%                   |
| INSPEKTORAT                  | 665,08            | 13       | 445,54    | 15        | 404,46    | 0                           | 0,00      | 28          | 850,00     | 127,80%                  |
| PPSDM PBJ                    | 3.990,03          | 1        | 465,15    | 20        | 1.758,41  | 61                          | 1.775,32  | 82          | 3.998,87   | 100,22%                  |
| PUSDATIN                     | 7.323,88          | 42       | 5.561,62  | 25        | 722,05    | 3                           | 430,21    | 70          | 6.713,89   | 91,67%                   |
| TOTAL                        | 132.585,29        | 501      | 86.946,55 | 347       | 32.126,31 | 366                         | 13.482,40 | 1214        | 132.555,25 | 99,98%                   |

 Persentase Penayangan Tidak 100%

Rata-rata persentase penayangan sebesar 89,90% dikarenakan masih terdapat unit organisasi yang melakukan proses revisi menayangkan paket pengadaan. Selisih pagu pengadaan dengan penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar Rp 30.038.290.

### 1.3 KOMITMEN/KONTRAK

Berdasarkan aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Oktober 2023, LKPP memiliki 103 paket komitmen/kontrak yang didaftarkan. Adapun nilai total seluruh paket yang telah didaftarkan adalah **Rp35.100.577.025**. Terdapat 72 paket telah selesai terealisasi sebesar Rp22.507.328.730. Kemudian terdapat 23 kontrak yang masih berjalan dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp11.262.513.248 yang telah direalisasi sebesar RpRp8.267.963.990 dan nilai sisa kontrak sebesar Rp2.994.549.258. Serta terdapat 8 kontrak yang belum dimulai.

Berikut terlampir daftar 31 paket komitmen/kontrak yang masih terdapat sisa kontrak yang belum realisasi, yaitu:

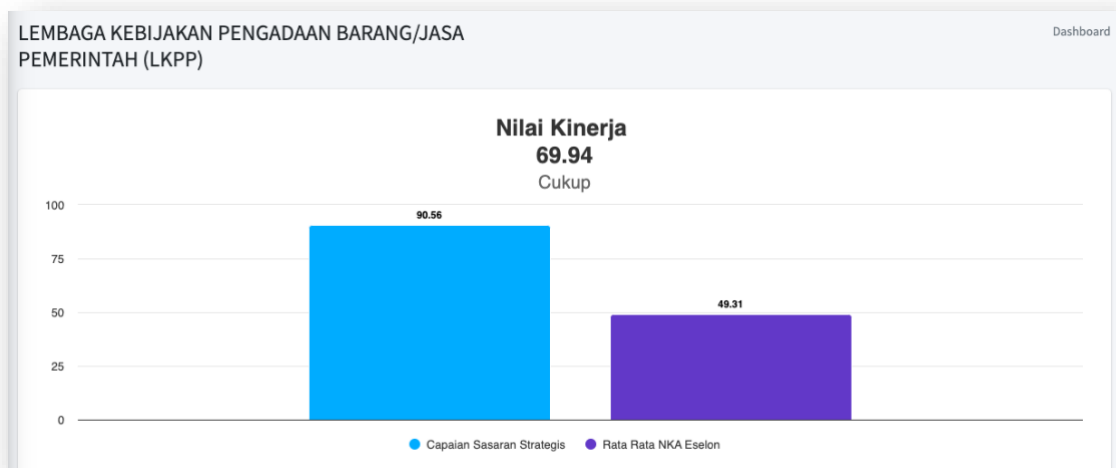
| No  | Uraian Kontrak                                                                                                                           | Nilai Kontrak<br>(Rp) | Nilai Realisasi<br>(Rp) | Nilai Sisa<br>(Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.  | Jasa Konsultasi Badan Usaha Pengembang Aplikasi Pendukung SPSE Terpusat                                                                  | 1.684.730.250         | 1.444.054.500           | 240.675.750        |
| 2.  | Jasa Konsultasi Badan Usaha Pengembang Aplikasi SPSE Terpusat                                                                            | 1.392.772.500         | 1.193.805.000           | 198.967.500        |
| 3.  | Sewa Internet Utama Operasional Direktorat PSPSE                                                                                         | 888.000.000           | 740.000.000             | 148.000.000        |
| 4.  | Sewa Internet Data Center DCI Secondary                                                                                                  | 189.500.000           | 159.581.500             | 29.918.500         |
| 5.  | Sewa Internet Zoom Operasional Direktorat PSPSE                                                                                          | 114.000.000           | 95.000.000              | 19.000.000         |
| 6.  | Sewa Internet Data Center DCI Primary                                                                                                    | 928.800.000           | 774.000.000             | 154.800.000        |
| 7.  | Jasa Konsultasi Perorangan IT Software Architect                                                                                         | 395.472.000           | 376.640.000             | 18.832.000         |
| 8.  | Jasa Konsultasi Perorangan Pengaman Enkripsi Data                                                                                        | 161.000.000           | 126.000.000             | 35.000.000         |
| 9.  | Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Eselon II                                                                                           | 1.685.236.800         | 1.263.927.600           | 421.309.200        |
| 10. | Sewa Communication Center (Call Center) Tahun 2023                                                                                       | 818.438.298           | 595.227.840             | 223.210.458        |
| 11. | Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Angkut (Gondola) di Gedung LKPP                                                                          | 135.000.000           | 94.500.000              | 40.500.000         |
| 12. | Jasa Lainnya Pengelola Media Sosial Kepala LKPP                                                                                          | 155.000.000           | 124.000.000             | 31.000.000         |
| 13. | Pengadaan Sewa Air Conditioner di Gedung LKPP                                                                                            | 117.049.500           | 58.524.750              | 58.524.750         |
| 14. | Sewa kendaraan operasional Eselon II                                                                                                     | 212.000.000           | -                       | 212.000.000        |
| 15. | Sewa Metro-E                                                                                                                             | 520.000.000           | 390.000.000             | 130.000.000        |
| 16. | Pembuatan Bahan Pembelajaran Multimedia Interaktif Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP Tahun Anggaran 2023 | 465.145.500           | 186.058.200             | 279.087.300        |
| 17. | Pemeliharaan Data Center TA 2023                                                                                                         | 155.400.000           | 77.700.000              | 77.700.000         |
| 18. | Jasa konsultasi perorangan perencana revitalisasi gedung LKPP                                                                            | 70.944.000            | 60.302.400              | 10.641.600         |
| 19. | Swakelola Penyusunan Kajian Roadmap Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                | 300.000.000           | 120.000.000             | 180.000.000        |

| No           | Uraian Kontrak                                                                                          | Nilai Kontrak<br>(Rp) | Nilai Realisasi<br>(Rp) | Nilai Sisa<br>(Rp)   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 20.          | Swakelola Pengadaan Kajian Evaluasi Kinerja PBJP Nasional Tahun 2022                                    | 400.000.000           | 120.000.000             | 280.000.000          |
| 21.          | Sewa standing AC 5PK                                                                                    | 119.880.000           | 59.940.000              | 59.940.000           |
| 22.          | Pengadaan Perbaikan Sistem Informasi Bagi SDM Kelembagaan PBJ Tahun Anggaran 2023                       | 99.722.400            | 49.861.200              | 49.861.200           |
| 23.          | Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi Perbaikan Sistem Informasi Sertifikasi PBJ TA 2023 | 94.572.000            | 47.286.000              | 47.286.000           |
| 24.          | Konsultan Penyusunan Kajian Restrukturisasi Organisasi                                                  | 209.000.000           | -                       | 209.000.000          |
| 25.          | Pengadaan Jasa Konsultansi Pendampingan Penyusunan Dokumen dan Implementasi ISO 27001:2022              | 247.000.000           | -                       | 247.000.000          |
| 26.          | Pengadaan Pembangunan Aplikasi Portal dan Website LKPP Tahun 2023                                       | 162.000.000           | -                       | 162.000.000          |
| 27.          | Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Kajian Manajemen Data di LKPP                              | 371.850.000           | 111.555.000             | 260.295.000          |
| 28.          | Jasa Lainnya Pembuatan Video Tutorial Aplikasi SIRUP                                                    | 98.235.000            | -                       | 98.235.000           |
| 29.          | Pelatihan Auditor Sistem Informasi                                                                      | 100.000.000           | -                       | 100.000.000          |
| 30.          | Pengadaan Jasa Lainnya Peningkatan Kapasitas Admin Sistem LPSE                                          | 190.000.000           | -                       | 190.000.000          |
| 31.          | Asesmen Potensi dan Kompetensi Pegawai                                                                  | 112.500.047           | -                       | 112.500.047          |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                         | <b>14.858.388.091</b> | <b>12.593.248.295</b>   | <b>8.267.963.990</b> |

## 1.4 PELAPORAN EKSTERNAL

### A. Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan

Aplikasi SMART DJA adalah sebuah aplikasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L. Aplikasi ini menampilkan hasil nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian/Lembaga dari level Satker, Unit Eselon I hingga level Kementerian/Lembaga. Nilai EKA ini akan digunakan sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.



Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi Smart DJA Kementerian Keuangan

Nilai kinerja LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan 22 November 2023 adalah sebesar 69,94 yang termasuk kedalam kategori Cukup, dengan rincian NKA Eselon I dan NKA Satuan Kerja sebagai berikut:

NKA Eselon I Monitoring / NKA Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan  entri Cari:

| No. | Kode Eselon I | Eselon I                                           | Kinerja | CSP   | Penyerapan | Konsistensi | CKP   | Efisiensi | Nilai Efisiensi | Rata Rata Satker |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|---------|-------|------------|-------------|-------|-----------|-----------------|------------------|
| 1   | 01            | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 49.31   | 48.10 | 74.96      | 98.82       | 63.93 | 1.69      | 54.225          | 43.70            |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya **1** Selanjutnya

Gambar 1. 2 Tampilan Aplikasi Smart DJA NKA Eselon I

NKA Satuan Kerja Monitoring / NKA Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan  entri Cari:

| No. | Kode Satuan Kerja | Satuan Kerja                                       | Kinerja | Penyerapan | Konsistensi | CRO   | Efisiensi | Nilai Efisiensi |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------|-----------|-----------------|
| 1   | 970968            | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | 43,70   | 74,96      | 98,82       | 19,79 | -6,24     | 34,40           |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya **1** Selanjutnya

Gambar 1. 3 Tampilan Aplikasi Smart DJA NKA Satuan Kerja

## B. Pelaporan Kinerja pada E-Monev Bappenas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev bappenas dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut: [https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-e-Monev\\_2021\\_v1\\_19032021.pdf](https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-e-Monev_2021_v1_19032021.pdf).

LKPP telah melaporkan kinerja pada e-monev Bappenas untuk periode kinerja Januari s.d Oktober 2023, dengan tampilan aplikasi e-monev seperti dibawah ini.



Gambar 1. 4 Tampilan Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas

## BAB II

### MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

Mengingat bahwa pemutakhiran data pada aplikasi Krisna Bappenas dan aplikasi SAKTI Kemenkeu sampai dengan saat ini masih berproses, dan sehubungan dengan belum berubahnya indikator dan target kinerja yang terdapat dalam aplikasi E-Monev dan aplikasi SMART maka indikator dan target kinerja yang dilaporkan pada bulan Oktober 2023 belum menggunakan indikator dan target yang ditetapkan sebagaimana pada dokumen perubahan Renstra berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.

#### 2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

##### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| <b>1. Sasaran Kegiatan</b> |                                                                                 |                                                                        |                                |                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                         | Sasaran Kegiatan                                                                | Indikator                                                              | Target 2023                    | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023                                                                                |
| 1                          | 01-Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan pengelolaan anggaran | Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)                             | Sama dengan rata-rata nasional | Nilai IKPA = 93,82                                                                                                |
| 2.                         | 02-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja                        | Nilai AKIP aspek perencanaan. pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja | Predikat: Sangat Baik          | Progres: LKPP telah melaporkan hasil pengukuran dan bukti dukung sebagai syarat penilaian SAKIP kepada KemenPANRB |

| <b>2. Rincian Output</b> |                                          |             |                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No                       | Rincian Output                           | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1                        | 994-Layanan Perkantoran                  | 1 Layanan   | Progres: 75%                       |
| 2.                       | 955-Layanan Manajemen Keuangan           | 17 Dokumen  | 14 Dokumen                         |
| 3.                       | 952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 5 Dokumen   | 1 Dokumen                          |

|    |                                     |           |           |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 4. | 953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 3 Dokumen | 1 Dokumen |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Oktober 2023 adalah 63,27%.

### 3. **Komponen**

Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 79,78%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp 58.009.162.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

| Jenis Belanja             | Pagu (Rp)             | Realisasi (Rp)        | Persentase     | Sisa Anggaran         |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>51 Belanja Pegawai</b> | 54.559.162.000        | 42.624.878.339        | 78.13%         | 11.934.283.661        |
| <b>52 Belanja Barang</b>  | 2.469.626.000         | 1.645.500.889         | 66.63%         | 824.125.111           |
| <b>53 Belanja Modal</b>   |                       | -                     | -              | -                     |
| <b>Total</b>              | <b>57.028.788.000</b> | <b>44.270.379.228</b> | <b>77.63 %</b> | <b>12.758.408.772</b> |

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BPKeu di bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Nilai IKPA pada bulan Oktober yaitu sebesar 93,82, mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan lalu yaitu sebesar 94,37.
2. Terhadap SK Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja lembaga, telah dilaporkan bahan paparan serta pemenuhan bukti dukung kepada Kementerian PANRB untuk proses evaluasi.
3. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran BPKeu (parsial) sebesar 150.878.532 Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 165.424.620 sehingga memiliki deviasi sebesar minus 14.546.088 atau -8.79%.

4. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) BPKeu adalah 105,29%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.

---

#### D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
2. Melakukan monitoring pelaporan serta dokumen pendukung yang telah diserahkan kepada Kementerian PANRB sebagai syarat evaluasi penilaian SAKIP, serta secara simultan menyiapkan untuk di masukkan kedalam dashboard SAKIP yg telah di kembangkan.
3. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai dalam sisa waktu aktif yang tersedia.
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
5. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
6. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP dalam sisa waktu efektif yang ada.
7. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Desember, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:

- a. Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan target sama dengan rata-rata nasional.
- b. Nilai AKIP aspek perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dengan target predikat Sangat Baik.
- c. Layanan Perkantoran dengan target 1 Layanan.
- d. Layanan Manajemen Keuangan dengan target 17 Dokumen.
- e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan target 5 Dokumen.
- f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan target 3 Dokumen.

## 2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 5 indikator sasaran kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. | Sasaran Kegiatan                                                            |                                                                               |                         |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| No | Sasaran Kegiatan                                                            | Indikator                                                                     | Target 2023             | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1  | 01-Terselenggaranya sistem manajemen ASN yang mendukung profesionalitas SDM | 01-Indeks profesionalitas ASN LKPP                                            | Predikat: Sangat Tinggi | Progres: 91.18%               |
|    |                                                                             | 02-Indeks sistem merit                                                        | Predikat: Sangat Baik   | Progres: 89.75%               |
| 2. | 02-Meningkatnya nilai reformasi birokrasi area penguatan perundang-undangan | 01-Nilai reformasi birokrasi LKPP area penguatan peraturan perundang-undangan | Predikat: Sangat baik   | Progres: 90%                  |
| 3. | 03-Terpenuhinya kualitas penerapan reformasi birokrasi                      | 01-Jumlah rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP                       | 1 Rekomendasi           | Progres: 77%                  |
|    |                                                                             | 02-Laporan evaluasi organisasi dan tata laksana                               | 1 Laporan               | Progres: 89%                  |

| 2. | Rincian Output                                  |             |                                    |
|----|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No | Rincian Output                                  | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1  | 957-Layanan Hukum                               | 1 Layanan   | Progres: 89.73%                    |
| 2. | 960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 2 Layanan   | Progres: 89%                       |
| 3. | 969-Layanan Bantuan Hukum                       | 1 Layanan   | Progres: 90.91%                    |
| 4. | 954-Layanan Manajemen SDM                       | 357 Orang   | 305 Orang                          |

|    |                               |           |              |
|----|-------------------------------|-----------|--------------|
| 5. | 961-Layanan Reformasi Kinerja | 1 Dokumen | Progres: 77% |
|----|-------------------------------|-----------|--------------|

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Oktober 2023 adalah 86,43%.

### 3. Komponen

Tahun 2023, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 82,94%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran BHOSDM TA 2023 adalah sebesar Rp 5.548.887.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | Persentase    | Sisa Anggaran        |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 51 Belanja Pegawai | -                    | -                    | 0%            | -                    |
| 52 Belanja Barang  | 5.548.887.000        | 3.313.594.027        | 59.72%        | 2.235.292.973        |
| 53 Belanja Modal   | -                    | -                    | 0%            | -                    |
| <b>Total</b>       | <b>5.548.887.000</b> | <b>3.313.594.027</b> | <b>59.72%</b> | <b>2.235.292.973</b> |

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran BHOSDM (parsial) sebesar Rp233.672.750. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp751.567.911 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp517.895.161 atau minus 68,91%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHOSDM adalah 107,28% yang ditayangkan. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.

#### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
5. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
  - a. Indeks profesionalitas ASN LKPP dengan target predikat sangat tinggi
  - b. Indeks sistem merit dengan target predikat sangat baik
  - c. Nilai reformasi birokrasi LKPP area penguatan peraturan perundang-undangan dengan target predikat sangat baik
  - d. Jumlah rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP dengan target 1 rekomendasi
  - e. Laporan evaluasi organisasi dan tata laksana dengan target 1 laporan
  - f. Layanan Hukum dengan target 1 layanan
  - g. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dengan target 2 layanan
  - h. Layanan Bantuan Hukum dengan target 1 layanan
  - i. Layanan Manajemen SDM dengan target 357 orang
  - j. Layanan Reformasi Kinerja dengan target 1 dokumen

## 2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 8 indikator Rincian Output, dan 18 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| <b>1.</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                                                    |                                                              |                       |                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| No        | Sasaran Kegiatan                                                                                           | Indikator                                                    | Target 2023           | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1         | 01-Terwujudnya pelayanan tata kelola organisasi melalui pelaksanaan pengelolaan kearsipan                  | 01-Hasil pengawasan kearsipan                                | Predikat: Sangat Baik | Progres: 80%                       |
| 2.        | 02-Terpenuhinya kualitas penerapan pelayanan publik                                                        | 01-Rekomendasi atas hasil evaluasi IKM                       | 1 Rekomendasi         | Progres: 83.30%                    |
|           |                                                                                                            | 02-Indeks Keterbukaan Informasi Publik                       | Indeks: Informatif    | Progres: 79.46%                    |
| 3.        | 03-Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan pemenuhan sarana, prasarana dan kesekretariatan | 01-Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I | Indeks: Cukup Puas    | Progres: 25%                       |

| <b>2.</b> | <b>Rincian Output</b>                 |             |                                    |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No        | Rincian Output                        | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1         | 956-Layanan BMN                       | 1 Layanan   | Progres: 83%                       |
| 2.        | 958-Layanan Hubungan Masyarakat       | 4 Layanan   | Progres: 90.57%                    |
| 3.        | 959-Layanan Protokoler                | 1 Layanan   | Progres: 77%                       |
| 4.        | 962-Layanan Umum                      | 1 Layanan   | Progres: 80%                       |
| 5.        | 994-Layanan Perkantoran               | 1 Layanan   | Progres: 82.75%                    |
| 6.        | 951-Layanan Sarana Internal           | 87 Unit     | 37 Unit                            |
| 7.        | 971-Layanan Prasarana Internal        | 1 Unit      | Progres: 47%                       |
| 8.        | 974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | 1 Dokumen   | Progres: 75%                       |

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan Oktober 2023 adalah 72,23%.

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>3.</b> | <b>Komponen</b> |
|-----------|-----------------|

Tahun 2023 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum memiliki 18 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 80,11%.

---

## B. Capaian Kinerja Anggaran

---

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran BHU TA 2023 adalah sebesar Rp50.310.815.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)      | Realisasi (Rp) | Persentase | Sisa Anggaran  |
|--------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 51 Belanja Pegawai | -              | -              | 0%         | -              |
| 52 Belanja Barang  | 43.348.225.000 | 28.566.608.485 | 65.9 %     | 14.781.616.515 |
| 53 Belanja Modal   | 6.261.201.000  | 4.770.346.718  | 76.19 %    | 1.490.854.282  |
| Total              | 49.609.426.000 | 33.336.955.203 | 67.2 %     | 16.272.470.797 |

---

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

---

Beberapa catatan pada BHU di bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran BHU (parsial) sebesar Rp3.085.738.033. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp3.529.375.329 sehingga memiliki deviasi sebesar minus Rp443.637.296 atau -12,57%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHU adalah 90,75% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Informasi permohonan peliputan sering kali diterima beberapa menit sebelum pelaksanaan, disisi lain humas sudah pernah mensosialisasikan SOP permohonan peliputan kepada seluruh Unor Es II. Peliputan kegiatan bulan Oktober diantaranya Audiensi HIPMI dan kunjungan kerja ka LKPP ke Sorong; Pameran I2SPE di Westin Jakarta.

---

## D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
4. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
6. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
  - a. Hasil pengawasan kearsipan dengan target predikat Sangat Baik
  - b. Rekomendasi atas hasil evaluasi IKM dengan target 1 rekomendasi
  - c. Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan target indeks informatif
  - d. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I dengan target indeks cukup puas
  - e. Layanan BMN dengan target 1 Layanan
  - f. Layanan Hubungan Masyarakat dengan target 4 layanan
  - g. Layanan Protokoler dengan target 1 Layanan
  - h. Layanan Umum dengan target 1 Layanan
  - i. Layanan Perkantoran dengan target 1 Layanan
  - j. Layanan Sarana Internal dengan target 87 Unit
  - k. Layanan Prasarana Internal dengan target 1 unit
  - l. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan target 1 Dokumen

## 2 .4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 1 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| <b>1.</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                       |                                                                          |             |                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| No        | Sasaran Kegiatan                                                              | Indikator                                                                | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1.        | 01-Tersedianya rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas | 01-Jumlah rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas | 6 Rumusan   | 2 Rumusan                     |

|    |                                                                                    |                         |                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2. | Rincian Output                                                                     |                         |                               |
| No | Rincian Output                                                                     | Target 2023             | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1  | 111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 6 Rancangan Peraturan   | 2 Rancangan Peraturan         |
| 2. | 111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum                              | 4 Rekomendasi Kebijakan | Progres: 87.78%               |
| 3. | 111-Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik               | 1 RUU                   | Progres: 64.80%               |

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.1 pada bulan Oktober 2023 adalah 80,74%.

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>3.</b> | <b>Komponen</b> |
|-----------|-----------------|

Tahun 2023, D1.1 memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 73,26%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran D1.1 TA 2023 adalah sebesar Rp4.416.185.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

| Jenis Belanja             | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | Persentase    | Sisa Anggaran        |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>51 Belanja Pegawai</b> | -                    | -                    | 0%            | -                    |
| <b>52 Belanja Barang</b>  | 4.416.185.000        | 2.326.763.150        | 52.69%        | 2.089.421.850        |
| <b>53 Belanja Modal</b>   | -                    | -                    | 0%            | -                    |
| <b>Total</b>              | <b>4.416.185.000</b> | <b>2.326.763.150</b> | <b>52.69%</b> | <b>2.089.421.850</b> |

| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase | Sisa Anggaran |
|---------------|-----------|----------------|------------|---------------|
|---------------|-----------|----------------|------------|---------------|

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran D1.1 (parsial) sebesar Rp230.014.169. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp725.819.482 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp495,805,313 atau -68,31%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.1 adalah 80,52%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terkait dengan RO Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat kendala berupa belum adanya kepastian waktu revisi Perpres PBJ diundangkan sehingga penentuan waktu *kick off* perlem menjadi mundur. Paralel dengan hal tersebut saat ini telah disusun draft perlem.
4. Terkait dengan RO Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik:
  - a. Pada komponen Penyiapan Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik ke DPR, masih menunggu proses di Setneg.
  - b. Pada komponen Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik belum dimulai karena masih menunggu UU diterbitkan.
5. Terkait dengan RO Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dari target sebanyak empat rekomendasi kebijakan saat ini seluruhnya masih dalam proses dan diperkirakan mulai terdapat realisasi output di triwulan IV.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:

- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
  5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya, selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
  6. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
    - a. Indikator Sasaran kegiatan "Jumlah rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas" dengan target 6 rumusan.
    - b. Indikator Rincian output "Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" dengan target 6 rancangan peraturan.

## 2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. | Sasaran Kegiatan                                                    |                                                        |                     |                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| No | Sasaran Kegiatan                                                    | Indikator                                              | Target 2023         | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1. | 02-Tersedianya strategi/kebijakan pengadaan khusus yang berkualitas | 01-Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD | 1 Dokumen Kebijakan | Progres: 90%                  |
|    |                                                                     | 02-Dokumen kebijakan pengadaan KPBU                    | 1 Dokumen Kebijakan | Progres: 90%                  |

| No | Sasaran Kegiatan                                                               | Indikator                                                                                                           | Target 2023         | Realisasi/Progres s.d Oktober |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|    |                                                                                | 03-Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di desa                                                                  | 1 Dokumen Kebijakan | Progres: 90%                  |
| 2. | 03-Terselenggaranya pendampingan/pemberian pendapat kebijakan pengadaan khusus | 01-Dokumen pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha. BLU/BLUD Badan Hukum Publik. KPBU dan Desa | 3 Dokumen           | 2 Dokumen (Progres: 85%)      |

## 2. Rincian Output

| No | Rincian Output                                                  | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1  | 124-Model Dokumen PBJ Khusus                                    | 3 NSPK      | Progres: 90%                  |
| 2. | 123-Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus | 10 Lembaga  | 8 Lembaga Progres: 87.23%     |

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D1.2 pada bulan Oktober 2023 adalah 88,62%.

## 3. Komponen

Tahun 2023, D1.2 memiliki 6 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 88,61%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu D1.2 TA 2023 adalah sebesar Rp1.652.800.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | Persentase    | Sisa Anggaran      |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 51 Belanja Pegawai | -                    | -                    | 0%            | -                  |
| 52 Belanja Barang  | 1.652.800.000        | 1.237.762.525        | 74,89%        | 415.037.475        |
| 53 Belanja Modal   | -                    | -                    | 0%            | -                  |
| <b>Total</b>       | <b>1.652.800.000</b> | <b>1.237.762.525</b> | <b>74,89%</b> | <b>415.037.475</b> |

---

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

---

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran D1.2 (parsial) sebesar Rp23.833.348. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp216.241.396 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp192.408.048 atau -88,98%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.2 adalah 100% yang telah ditayangkan.
3. Pada SK Tersedianya strategi/kebijakan pengadaan khusus yang berkualitas terdapat permasalahan berupa adanya beberapa persepsi Peraturan pada BLUD.

---

### D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan yang mendalam pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana. karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
  - a. Skor indeks penyedia di desa dengan target skor 0,6.
  - b. Persentase peningkatan partisipasi investor swasta/asing dalam proses pengadaan KPBU/KPDBU dengan target 5 Persen.

- c. Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD dengan target 1 Dokumen Kebijakan.
- d. Dokumen kebijakan pengadaan KPBU dengan target 1 Dokumen Kebijakan.
- e. Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di desa dengan target 1 Dokumen.
- f. Dokumen pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha. BLU/BLUD Badan Hukum Publik, KPBU dan Desa dengan target 3 dokumen.

## 2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. Sasaran Kegiatan |                                                                       |                                                                                          |                     |                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| No                  | Sasaran Kegiatan                                                      | Indikator                                                                                | Target 2023         | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1.                  | 04-Terpenuhinya kebijakan PBJP dalam kerangka kerjasama internasional | Jumlah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kerangka kerjasama internasional | 1 Dokumen Kebijakan | Progres: 89.75%               |
| 2.                  | 01-Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam PBJ           | 01-Peningkatan jumlah pelaku usaha UMK yang terlibat dalam PBJP                          | 252 Pelaku Usaha    | 242 Pelaku Usaha              |

| 2. Rincian Output |                                                                                                           |                 |                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| No                | Rincian Output                                                                                            | Target 2023     | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1.                | 131-Hasil Kesepakatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kerangka Kerjasama Perdagangan Internasional | 3 Kesepakatan   | Progres: 89.75%               |
| 2.                | 131-Badan Usaha yang Difasilitasi dalam Peluang Akses PBJ Internasional                                   | 500 Badan Usaha | 464 Badan Usaha               |
| 3.                | 131-NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                   | 2 NSPK          | Progres: 75%                  |
| 4.                | 132-Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ                              | 1240 UMKM       | 1307 UMKM                     |

 Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D1.3 pada bulan Oktober 2023 adalah 84,94%.

### 3. Komponen

Tahun 2023, D1.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 80,83%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu D1.3 TA 2023 adalah sebesar Rp1.580.100.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | Persentase    | Sisa Anggaran      |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 51 Belanja Pegawai | -                    | -                    | 0%            | -                  |
| 52 Belanja Barang  | 1.580.100.000        | 1.048.381.218        | 66.35%        | 531.718.782        |
| 53 Belanja Modal   | -                    | -                    | 0%            | -                  |
| <b>Total</b>       | <b>1.580.100.000</b> | <b>1.048.381.218</b> | <b>66.35%</b> | <b>531.718.782</b> |

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran D1.3 (parsial) sebesar Rp105.972.383. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp241.540.150. sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp135.567.767 atau -56,13%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.3 adalah 101,29%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat satu RO yang telah mencapai target yaitu Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ dengan realisasi sebesar 1307 UMKM (capaian 105,40%) yang tercapai melalui enam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha.
4. Pada indikator SP Jumlah Partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam Kerangka Kerjasama Internasional dengan target 135 Pelaku Usaha telah terdapat realisasi sebesar 102 Pelaku Usaha, diperkirakan realisasi target akan dicapai di akhir tahun.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
5. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dengan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
6. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih berproses yaitu pada indikator:
  - a. Jumlah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kerangka kerjasama internasional dengan target 1 dokumen kebijakan.
  - b. Peningkatan jumlah pelaku usaha UMK yang terlibat dalam PBJP dengan target 252 pelaku usaha.
  - c. Hasil Kesepakatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kerangka Kerjasama Perdagangan Internasional dengan target 3 kesepakatan.
  - d. Badan usaha yang difasilitasi dalam peluang akses PBJ Internasional dengan target 500 badan usaha.
  - e. NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan target 2 NSPK.

## 2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) memiliki 5 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                     |                                                                                                            |             |                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| No                  | Sasaran Kegiatan                                                                                                                    | Indikator                                                                                                  | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1.                  | 01-Meningkatnya kualitas sistem informasi perencanaan pengadaan yang mendorong produk dalam negeri dan meningkatnya partisipasi UMK | 01-Persentase paket pengadaan yang dicadangkan bagi UMK dalam Rencana Umum Pengadaan                       | 50 Persen   | 53,8 Persen                   |
|                     |                                                                                                                                     | 02-Persentase penggunaan produk dalam negeri pada paket pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan             | 52,5 Persen | 91,9 Persen                   |
| 2.                  | 02-Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan monev pengadaan                                                        | 01-Persentase realisasi penayangan Rencana Umum Pengadaan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan | 75 Persen   | 109.1 Persen                  |
|                     |                                                                                                                                     | 02-Capaian indeks kinerja pengadaan barang/jasa                                                            | Indeks = 35 | Indeks = 54                   |
| 3.                  | 03-Terwujudnya peningkatan efektivitas proses pengadaan melalui sistem informasi yang terintegrasi                                  | 01-Jumlah pengembangan, integrasi, dan implementasi sistem perencanaan dan monitoring-evaluasi pengadaan   | 6 Segmen    | 5 Segmen                      |

 Target telah tercapai

| 2. Rincian Output |                                                                 |             |                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No                | Rincian Output                                                  | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.                | 211-Dokumen Rencana Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pengadaan | 1 Dokumen   | Progres: 70,50%                    |
| 2.                | 211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan                            | 2 Laporan   | Progres: 75,64%                    |

| No | Rincian Output                                   | Target 2023        | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
|----|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|    | Evaluasi Kinerja PBJP                            |                    |                                    |
| 3. | 211-Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi         | 1 Sistem Informasi | Progres: 80%                       |
| 4. | 212-Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi | 1 Sistem Informasi | Progres: 84%                       |

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D2.1 pada bulan Oktober 2023 adalah 77,54%.

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>3.</b> | <b>Komponen</b> |
|-----------|-----------------|

Tahun 2023, D2.1 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 78,29%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran D2.1 TA 2023 adalah sebesar Rp3.570.080.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

| Jenis Belanja             | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | Persentase     | Sisa Anggaran        |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>51 Belanja Pegawai</b> | -                    | -                    | -              | -                    |
| <b>52 Belanja Barang</b>  | 3.243.165.000        | 1.691.459.227        | 52.15%         | 1.551.705.773        |
| <b>53 Belanja Modal</b>   | -                    | -                    | -              | -                    |
| <b>Total</b>              | <b>3.243.165.000</b> | <b>1.691.459.227</b> | <b>52.15 %</b> | <b>1.551.705.773</b> |

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi penyerapan anggaran D2.1 (parsial) adalah sebesar Rp303.588.275. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp542.560.994 sehingga memiliki deviasi sebesar minus (-)Rp238.972719atau minus (-) 44,05%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.1 yang telah ditayangkan adalah 109,14%, hal tersebut dikarenakan rencana pengadaan yang belum seluruhnya *diinput* pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.

3. Terdapat beberapa permasalahan pada indikator Sasaran Program, antara lain:
  - a. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa, realisasi sampai dengan bulan Oktober 2023 adalah sebesar 88,81 persen, realisasi tersebut sudah jauh melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 52,5 persen.
  - b. Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan terdapat permasalahan bahwa Indikator ini sangat bergantung pada realisasi pengadaan K/L/Pemda, oleh karena itu kemungkinan akhir tahun baru bisa mendapatkan hasil pengukuran dari Sasaran Program ini.
4. Terdapat 3 indikator Sasaran Kegiatan yang sampai dengan bulan Oktober 2023 realisasinya telah melebihi target, antara lain:
  - a. Persentase penggunaan produk dalam negeri pada paket pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan, dengan realisasi sebesar 62,5 persen dari target 52,5 persen.
  - b. Persentase realisasi penayangan Rencana Umum Pengadaan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, dengan realisasi sebesar 104 persen dari target 75 persen.
  - c. Capaian indeks kinerja pengadaan barang/jasa, dengan realisasi 53,8 (indeks) dari target 35 (indeks).
5. Terdapat permasalahan pada SK Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan moneyv pengadaan, dikarenakan Nilai Belanja Pengadaan pada KLPD yang dinamis mengakibatkan persentase melebihi 100%.
6. Terdapat permasalahan pada Rincian Output yang mendukung program Prioritas Nasional, yaitu Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi terdapat kendala yang masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu:
  - 1) Pada proses integrasi antara AMEL dan SIPD dengan Kementerian Dalam Negeri yang sampai saat ini belum merespon kembali terkait permintaan integrasi, dikarenakan saat ini Kemendagri juga sedang melakukan pengembangan sistem baru (SIPD-RI).
  - 2) Pada proses integrasi AMEL dengan SAKTI/OMSPAN terkait data Pembayaran untuk tahun 2023, dimana sampai saat ini tim AMEL belum mendapatkan token yang digunakan dalam proses penarikan data dikarenakan permasalahan di internal pengelola SAKTI/OMSPAN.
7. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
  - a. Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi.
  - b. Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi.

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
4. Terkait dengan adanya indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang telah melebihi target agar berkoordinasi secara resmi melalui Nota Dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja tahun 2023.
5. Terkait permasalahan indikator Sasaran Program Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan diharapkan mengintensifkan sosialisasi baik secara daring maupun luring kepada K/L/Pemda terkait dengan realisasi pengadaan pada tiap instansi.
6. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.
7. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang sekiranya masih berproses yaitu:
  - a. Indikator Sasaran Program:
    - 1) Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan dengan target 45 persen,
    - 2) Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaanJumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan dengan target 150 K/L/Pemda,
  - b. Sasaran Kegiatan:
    - 1) Persentase paket pengadaan yang dicadangkan bagi UMK dalam Rencana Umum Pengadaan dengan target 50 Persen,

c. Rincian Output:

- 1) Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP dengan target 2 Laporan,
- 2) Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi dengan target 1 Sistem Informasi,
- 3) Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi dengan target 1 Sistem Informasi.

## 2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) memiliki 6 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 8 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |             |                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No                  | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                          | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.                  | 07-Terpenuhinya integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya | 01-Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat                                                                                                             | 300 LPSE    | 284 LPSE                           |
|                     |                                                                                                                                                                      | 02-Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia. pelaksanaan kontrak. serah terima pekerjaan. dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya | 80 Persen   | 63 Persen                          |
|                     |                                                                                                                                                                      | 03-Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui non e-Purchasing                                                       | 52,5 Persen | 84,17 Persen                       |
|                     |                                                                                                                                                                      | 04-Persentase nilai transaksi UMK dalam pengadaan melalui non e-Purchasing terhadap RUP                                                                            | 45 Persen   | 83,25 Persen                       |
| 2.                  | 08-Terpenuhinya standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik                                                                                              | 01-Persentase pemenuhan standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik                                                                                    | 35 Persen   | 30 Persen                          |
| 3.                  | 09-Terpenuhinya fungsi layanan pengadaan secara elektronik dan layanan dukungan pengguna yang berkualitas                                                            | 01-Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem pengadaan secara elektronik                                                                               | 100 Persen  | 83 Persen                          |

 Target telah tercapai

| <b>2. Rincian Output</b> |                                             |              |                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| No                       | Rincian Output                              | Target 2023  | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.                       | 231-SPSE Terpusat                           | 300 Layanan  | 284 Layanan                        |
| 2.                       | 234-Pedoman Tata Kelola LPSE                | 1 Pedoman    | Progres: 83.33 Persen              |
| 3.                       | 231-Penerima Layanan Dukungan Pengguna SPSE | 10.400 Orang | 15.860 Orang                       |

 Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.2 pada bulan Oktober 2023 adalah 83,78%.

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>3. Komponen</b> |  |
|--------------------|--|

Tahun 2023, D2.2 memiliki 8 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 80,12%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran D2.2 TA 2023 adalah sebesar Rp**32.064.727.000**. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

| Jenis Belanja             | Pagu (Rp)             | Realisasi (Rp)        | Persentase    | Sisa Anggaran        |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>51 Belanja Pegawai</b> | -                     | -                     | 0%            | -                    |
| <b>52 Belanja Barang</b>  | 21.287.259.000        | 13.490.063.063        | 63.37%        | 7.797.195.937        |
| <b>53 Belanja Modal</b>   | 7.920.325.000         | 6.534.547.500         | 82.5%         | 1.385.777.500        |
| <b>Total</b>              | <b>29.207.584.000</b> | <b>20.024.610.563</b> | <b>68.56%</b> | <b>9.182.973.437</b> |

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.2 di bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran D2.2 (parsial) sebesar Rp1.355.747.554. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1,884.353.579 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp528.606.025 atau -28,05%
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.2 adalah 116,92% yang ditayangkan. hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya ditayangkan.

3. Pada Sasaran Program Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan, Indikator Sasaran Program sangat bergantung pada realisasi pengadaan K/L/PD pada pemanfaatan sistem pengadaan sehingga menunggu akhir tahun untuk mendapatkan hasil pengukuran dari Sasaran Program ini.
4. Pada SK Terpenuhinya integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya terdapat beberapa kendala, diantaranya:
  - a. Indikator Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat:  
Penarikan data dari 21 service SPSE Terpusat memakan waktu yang cukup lama. Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat didapat dari pengambilan data yang ada di lapangan, saat ini sedang dilakukan penyesuaian sistem untuk dapat memfasilitasi penambahan LPSE pada LPSE yang menggunakan *service-service* SPSE Terpusat seperti aplikasi SPSE, SIKAP, Inaproc, Portal eproc, LPSE Support dan sistem pendukung lainnya.
  - b. Indikator Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya: Belum adanya komunikasi yang efektif dengan Kementerian Keuangan untuk integrasi sistem pembayaran, yaitu dalam hal inisiasi atau perubahan dalam pedoman integrasi antara sistem SPSE dengan SPBE K/L Lainnya.
5. Pada komponen Pengembangan SPSE Terpusat sedang dilakukan penyesuaian sistem untuk dapat memfasilitasi penambahan LPSE pada LPSE yang menggunakan *service-service* SPSE Terpusat seperti aplikasi SPSE, SIKAP, Inaproc, Portal eproc, Lpse Support dan sistem pendukung lainnya.
6. Pada SK Terpenuhinya standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik terdapat beberapa LPSE yang tidak mengikuti bimtek secara disiplin, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk melakukan perbaikan.
7. Pada komponen Konsultasi Publik, kurangnya minat LPSE untuk memenuhi 17 standar.
8. Pada komponen Penyusunan Pedoman, Kebijakan SMKI sedang disusun memungkinkan adanya perubahan pedoman yang telah disusun

---

#### D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
- 3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
- 4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
- 5. Pada Indikator Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat:
  - a. SPSE dapat mempercepat proses pengambilan data dengan memastikan bahwa sistem yang digunakan sudah terintegrasi dengan baik.
  - b. Dapat mempertimbangkan untuk menggunakan sistem otomatisasi dalam pengambilan data untuk mempercepat proses.
- 6. Pada Indikator Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya agar dapat melakukan komunikasi yang lebih aktif dan terstruktur dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa integrasi sistem pembayaran dapat dilakukan dengan baik.
- 7. Pada SK Terpenuhinya standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik, Tingkatkan komunikasi dengan LPSE tentang pentingnya mengikuti bimtek secara disiplin dan dampak positifnya terhadap tata kelola layanan pengadaan dan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode bimtek yang lebih efektif.
- 8. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam proses, yaitu:
  - a. Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat dengan target 300 LPSE.
  - b. Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia. pelaksanaan kontrak. serah terima pekerjaan. dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya dengan target 80%.
  - c. Persentase pemenuhan standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik dengan target 35%.
  - d. Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem pengadaan secara elektronik dengan target 100%.
  - e. SPSE Terpusat dengan target 300 layanan
  - f. Pedoman Tata Kelola LPSE dengan target 1 layanan

## 2.9 DIREKTORAT SISTEM PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pasar Digital Pengadaan (D2.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. Sasaran Kegiatan |                                                                                              |                                                                                                 |                  |                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| No                  | Sasaran Kegiatan                                                                             | Indikator                                                                                       | Target 2023      | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.                  | 02-Meningkatnya kualitas e-purchasing yang mendorong produk dalam negeri dan partisipasi UMK | 01-Persentase peningkatan peran serta UKM pada Katalog Elektronik                               | 45 Persen        | 85,06 Persen                       |
|                     |                                                                                              | 02-Jumlah produk dalam negeri yang tayang dalam Katalog Elektronik                              | 2.000.000 Produk | 6.335.958 Produk                   |
| 2.                  | 04-Meningkatnya pemanfaatan sistem e-purchasing                                              | 01-Persentase penyelesaian paket pengadaan E-Purchasing                                         | 80 Persen        | 20 Persen                          |
| 3.                  | 05-Terpenuhinya integrasi katalog elektronik dan e-purchasing dengan sistem lainnya          | 01-Jumlah integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing dengan sistem lainnya. | 5 Segmen         | 5 Segmen                           |

| 2. Rincian Output |                                                            |                    |                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| No                | Rincian Output                                             | Target 2023        | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.                | 221-Pedoman Sistem Katalog dan Toko Daring                 | 2 Pedoman          | Progres: 69%                       |
| 2.                | 221-Produk yang Masuk <i>e-Catalogue</i>                   | 2.000.000 Produk   | 6.335.958 Produk                   |
| 3.                | 221-Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik | 1 Laporan          | Progres: 83,30%                    |
| 4.                | 221-Sistem <i>e-Purchasing</i> Terintegrasi                | 1 Sistem Informasi | Progres: 90%                       |

 Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.3 pada bulan Oktober 2023 adalah 81,41%.

### 3. Komponen

Tahun 2023 D2.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 73,94%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran D2.3 TA 2023 adalah sebesar Rp18.644.440.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

| Jenis Belanja    | Pagu (Rp)         | Realisasi (Rp)   | Persentase | Sisa Anggaran (Rp) |
|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|
| 51BelanjaPegawai | -                 | -                | 0%         | -                  |
| 52BelanjaBarang  | 10.879.629.000,00 | 5.508.012.843,00 | 50.63%     | 5.371.616.157,00   |
| 53BelanjaModal   | 741.500.000,00    | 574.547.800,00   | 77.48%     | 166.952.200,00     |
| Total            | 11.621.129.000,00 | 6.082.560.643,00 | 52.34%     | 5.538.568.357,00   |

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023 realisasi penyerapan anggaran D2.3 (parsial) adalah sebesar Rp551.225.589, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.349.824.750 sehingga memiliki deviasi sebesar minus -Rp798.599.161 atau minus 59.16%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.3 adalah 99.09% yang ditayangkan. hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya ditayangkan.
3. Terdapat beberapa catatan/permasalahan yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya yaitu:
  - a. Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas e-purchasing yang mendorong produk dalam negeri dan partisipasi UMK" terdapat kendala pada proses penarikan data pada *Dashboard* Monev Katalog yang seringkali terjadi perbedaan data dikarenakan sistem/server yang berat.
  - b. Indikator Sasaran Kegiatan "Persentase penyelesaian paket pengadaan e-purchasing" terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu, mayoritas PP/PPK pada K/L/Pd belum menyelesaikan paket sampai dengan serah terima.

- c. Pada indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan e-purchasing dengan sistem lainnya dan Rincian Output-Sistem E-Purchasing Terintegrasi", terdapat kendala bahwa perlu menunggu aturan terbaru terkait mini kompetisi konstruksi dan non konstruksi serta penggunaan e-purchasing oleh non K/L/PD (BUMN/BUMD/BLU/BLUD/BUMDes/BUMDesma).
4. Pada Indikator Sasaran Kegiatan dan Rincian Output Jumlah produk yang masuk e-catalogue, realisasi sampai dengan bulan Oktober 2023 sudah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 5.916.378 produk (PDN) dari target sebesar 2.000.000 produk (PDN).
5. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
  - a. Produk yang Masuk *e-Catalogue*; dan
  - b. Sistem *e-Purchasing* Terintegrasi

---

#### D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan Komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Membuat media informasi tentang tata cara penyelesaian paket pengadaan *e-purchasing* dan menyebarkan informasi tersebut kepada para PPK di seluruh K/L/PD agar memahami penyelesaian paket sampai dengan serah terima.
4. Terkait dengan kendala pada indikator Sasaran Kegiatan-Jumlah integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan e-purchasing dengan sistem lainnya dan indikator Rincian Output-Sistem E-Purchasing Terintegrasi, agar melakukan akselerasi proses penyusunan peraturan terkait mini kompetisi konstruksi dan non konstruksi serta penggunaan *e-purchasing* oleh non K/L/PD.
5. Terkait dengan Indikator Sasaran Kegiatan dan Rincian Output Jumlah produk yang masuk *e-catalogue* yang realisasinya telah melebihi target agar menginformasikan dan

berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja tahun 2023.

6. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.
7. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang sekiranya masih jauh dari target, antara lain:
  - a. Persentase penyelesaian paket pengadaan E-Purchasing dengan target 80%.
  - b. Pedoman Sistem Katalog dan Toko Daring dengan target 2 pedoman
  - c. Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik dengan target 1 laporan
  - d. Sistem e-Purchasing Terintegrasi dengan target 1 sistem informasi.

## 2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. Sasaran Kegiatan |                                                         |                                                                            |             |                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No                  | Sasaran Kegiatan                                        | Indikator                                                                  | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.                  | 01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten                    | 01-Jumlah SDM PBJ yang kompeten                                            | 4.575 Orang | 10825 Orang                        |
|                     |                                                         | 02-Persentase pemenuhan regulasi standar kompetensi PBJ                    | 80 Persen   | 64 Persen                          |
| 2.                  | 02-Terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan | 01-Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3 | 290 UKPBJ   | 261 UKPBJ                          |



Target telah tercapai

| 2. Rincian Output |                |             |                                    |
|-------------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| No                | Rincian Output | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |

|    |                                                                              |                         |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. | 311-Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 2 Rekomendasi Kebijakan | Progres: 85 Persen |
| 2. | 311-SDM JF PPBJ                                                              | 4475 Orang              | 7960 Orang         |
| 3. | 312-Pedoman Pengembangan Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ                      | 1 Pedoman               | Progres: 90 Persen |
| 4. | 311-UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3)                                  | 290 Lembaga             | 261 Lembaga        |



Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D3.1 pada bulan Oktober 2023 adalah 84,75%.

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>3.</b> | <b>Komponen</b> |
|-----------|-----------------|

Tahun 2023, D3.1 memiliki 11 Komponen dari 4 Rincian Output dan rata-rata capaian komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 83,94%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran D3.1 TA 2023 adalah sebesar Rp3.309.918.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

| Jenis Belanja             | Pagu (Rp)     | Realisasi (Rp) | Persentase | Sisa Anggaran |
|---------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| <b>51 Belanja Pegawai</b> | -             | -              | 0%         | -             |
| <b>52 Belanja Barang</b>  | 3.163.415.000 | 2.231.694.936  | 70.55%     | 931.720.064   |
| <b>53 Belanja Modal</b>   | -             | -              | 0%         | -             |
| <b>Total</b>              | 3.163.415.000 | 2.231.694.936  | 70.55%     | 931.720.064   |

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

1. D3.1 tidak menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) periode bulan Oktober 2023.
2. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran D3.1 (parsial) sebesar Rp127.812.939. Realisasi ini lebih kecil dari RPD sebesar Rp322.306.501. sehingga memiliki deviasi sebesar Rp194.493.562 atau -60,34%.

3. sdgPersentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D3.1 adalah 104.63% yang ditayangkan. hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya ditayangkan.
4. Terdapat beberapa permasalahan, yaitu:
  - a. Pada Sasaran Program Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan, masih banyak instansi yang belum menyampaikan SK Pengangkatan JF PPBJ di Instansinya.
  - b. Pada RO Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, progres terkendala karena terdapat perubahan format kuisisioner yang menyebabkan diperlukannya penyesuaian alur data dan belum dilakukan pembahasan terkait rancangan revisi Permen PAN RB 52/2020 dikarenakan personil SDM fokus pada pencapaian target prioritas nasional.
  - c. Pada RO UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3), pada setiap pelaksanaan kegiatan di beberapa lokasi terjadi kendala dalam mengakses aplikasi SIMKU, sehingga kegiatan mentoring tidak berjalan optimal.
  - d. Pada komponen Penilaian Angka Kredit, progres terkendala karena terbatasnya personil Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.
5. Terdapat 1 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3).

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

4. PIC pelaporan agar meng-*update* atau menginformasikan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh unit organisasi dalam melaksanakan kegiatan pada aplikasi SiREMON.
5. Agar pimpinan unit organisasi melakukan pemantauan melekat terhadap Sasaran Program Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan mengingat target sampai akhir tahun 2023 sebesar 19 persen dari 615 K/L/Pemda atau sebanyak 117 instansi.
6. Agar pembahasan terkait rancangan revisi Permen PAN RB 52/2020 dapat diprioritaskan mengingat sudah memasuki triwulan ke-IV.
7. Berkoordinasi dengan BHOSDM guna mencari solusi terhadap terbatasnya personil Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.
8. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
  - a. Persentase pemenuhan regulasi standar kompetensi PBJ dengan target 80 Persen.
  - b. Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3 dengan target 290 UKPBJ.
  - c. Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan target 2 Rekomendasi Kebijakan.
  - d. Pedoman Pengembangan Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ dengan target 1 Pedoman.
  - e. UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3) dengan target 290 Lembaga

## 2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 6 indikator Rincian Output, dan 17 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. | Sasaran Kegiatan                                               |                                                                      |             |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No | Sasaran Kegiatan                                               | Indikator                                                            | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1. | 03-Terwujudnya kapasitas SDM dan mutu layanan sertifikasi PBJP | 01-Tingkat keterandalan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah | 90 Persen   | 99,60 persen                       |

| 2. | Rincian Output |             |                                    |
|----|----------------|-------------|------------------------------------|
| No | Rincian Output | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |

|    |                                                          |             |                    |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1. | 331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar | 34 Lembaga  | 29 Lembaga         |
| 2. | 331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan                    | 75 Orang    | 7 Orang            |
| 3. | 331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ                          | 5.450 Orang | 5378 Orang         |
| 4. | 331-Pedoman Sertifikasi PBJP                             | 1 Pedoman   | Progres: 50 Persen |
| 5. | 332-Materi Uji Sertifikasi PBJP                          | 20 NSPK     | 18 NSPK            |
| 6. | 331-Sarana Sertifikasi PBJP                              | 196 Unit    | 128 Unit           |

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D3.3 pada bulan Oktober 2023 adalah 70,29%.

### 3. Komponen

Tahun 2023. D3.3 memiliki 17 Komponen dari 6 Rincian Output dan rata-rata capaian komponen pada bulan Oktober 2023 adalah 72,07%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran D3.3 TA 2023 adalah sebesar Rp4.086.500.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | Persentase    | Sisa Anggaran        |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 51 Belanja Pegawai | -                    | -                    | 0%            |                      |
| 52 Belanja Barang  | 3.903.512.000        | 2.290.717.735        | 58.68%        | 1.612.794.265        |
| 53 Belanja Modal   | -                    | -                    | 0%            |                      |
| <b>Total</b>       | <b>3.903.512.000</b> | <b>2.290.717.735</b> | <b>58.68%</b> | <b>1.612.794.265</b> |

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

1. D3.3 tidak menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) periode bulan Oktober 2023.
2. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran D3.3 (parsial) sebesar Rp173.158.904. Realisasi ini lebih kecil dari RPD sebesar Rp811.816.041 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp638.657.137 atau -78,67%.
3. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D3.3 adalah 104.69%. hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.

4. Pada indikator Sasaran Program Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ Masih banyak instansi yang belum menyampaikan SK Pengangkatan JF PPBJ di Instansinya.
5. Terdapat Refokusing anggaran pada RO Asesor yang Mendapatkan Pembinaan
6. Pada RO Sarana Sertifikasi PBJP terdapat beberapa permasalahan yaitu:
  - a. Kolaborasi pengembangan Aplikasi dengan tim pengembang yang berbeda.
  - b. Beban pekerjaan yang tinggi dikarenakan banyak permintaan penambahan fitur di Aplikasi PPSDM.
  - c. Kurangnya personil tim yang terlibat pada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi PPSDM dikarenakan hanya ada 2 personel programmer.
5. Terdapat 2 komponen evaluasi yang masih dalam tahap perencanaan, rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun.

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
  - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
2. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
3. Melakukan monitoring kepada instansi terkait perihal penyampaian SK Pengangkatan JF PPBJ.
4. Segera melakukan penyesuaian Materi Uji Kompetensi terhadap Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2023 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Berkoordinasi dengan BHOSDM guna mencari solusi terkait dengan keterbatasan personel pada pengelola sistem informasi sertifikasi.
6. Mengidentifikasi permasalahan terkait koordinasi dan mendiskusikan secara intensif bersama pimpinan untuk meminta arahan dan informasi yang jelas agar dapat menyelesaikan proyek tepat waktu.

7. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
  - a. Tingkat keterandalan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan target 90 Persen.
  - b. Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar dengan target 34 lembaga.
  - c. Asesor yang Mendapatkan Pembinaan dengan target 75 orang.
  - d. Peserta Sertifikasi SDM PBJ dengan target 5450 orang.
  - e. Pedoman Sertifikasi PBJP dengan target 1 pedoman.
  - f. Materi Uji Sertifikasi PBJP dengan target 20 NSPK.
  - g. Sarana Sertifikasi PBJP dengan target 196 unit.

## 2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. Sasaran Kegiatan |                                                                                                |                                                                 |             |                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No                  | Sasaran Kegiatan                                                                               | Indikator                                                       | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.                  | 01-Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat | 01-Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan clearing house         | 40 K/L      | 38 K/L                             |
| 2.                  | 02-Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Pusat                         | 01-Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice | 25 K/L      | 17 K/L                             |

| 2. Rincian Output |                                                                                                                                 |             |                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No                | Rincian Output                                                                                                                  | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.                | 412-Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House                                            | 20 K/L      | 17 K/L                             |
| 2.                | 411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ | 25 K/L      | 21 K/L                             |

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.1 pada bulan Oktober 2023 adalah 84,5%.

### 3. Komponen

Tahun 2023, D4.1 memiliki 6 Komponen dari 2 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 84%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran D4.1 TA 2023 adalah sebesar Rp1.027.600.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)        | Realisasi (Rp) | Persentase | Sisa Anggaran  |
|--------------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 51 Belanja Pegawai | -                | -              | -          | -              |
| 52 Belanja Barang  | 1.027.600.000,00 | 675.820.644,00 | 65.77%     | 351.779.356,00 |
| 53 Belanja Modal   | -                | -              | -          | -              |
| Total              | 1.027.600.000,00 | 675.820.644,00 | 65.77%     | 351.779.356,00 |

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran D4.1 (parsial) sebesar 78,702,139,-. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp. 175,206,398,- sehingga memiliki deviasi sebesar -96,504,259 atau -55,08%
1. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D4.1 adalah 100% telah ditayangkan.
2. Pada Sasaran Program Meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan, masih terdapat pemda yang hanya memenuhi indikator Clearing House ataupun Probity/Konsolidasi saja, sehingga saat ini sedang dalam proses membentuk pemda yang memenuhi kedua indikator tersebut dalam rangka mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. PIC pelaporan agar meng-*update* atau menginformasikan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh unit organisasi dalam melaksanakan kegiatan pada aplikasi SIREMON.
5. Agar dilakukan percepatan pemenuhan K/L yang memenuhi 2 indikator dalam penyelesaian permasalahan pengadaan secara mandiri, yaitu *Clearing House* dan Probity/Konsolidasi.
6. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
  - a. Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan clearing house dengan target 40 K/L.
  - b. Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice dengan target 25 K/L.
  - c. Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House dengan target 20 K/L.
  - d. Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ dengan target 25 K/L.

## 2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023 Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 2 indikator sasaran kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                | Indikator                                                                | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1. | 03-Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah | 01-Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan <i>clearing house</i>         | 80 Pemda    | <b>78 Pemda</b>                    |
| 2. | 05-Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Daerah                         | 01-Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i> | 50 Pemda    | <b>44 Pemda</b>                    |

## 2. Rincian Output

| No | Rincian Output                                                                                                                | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1. | 422- Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House                                           | 80 Pemda    | <b>78 Pemda</b>                    |
| 2. | 421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ | 50 Pemda    | <b>43 Pemda</b>                    |

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.2 pada bulan Oktober 2023 adalah 91,75%.

## 3. Komponen

Tahun 2023, D4.2 memiliki 6 Komponen dari 2 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 91,81%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran D4.2 TA 2023 adalah sebesar Rp1.552.865.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

| Jenis Belanja             | Pagu (Rp)     | Realisasi (Rp) | Persentase | Sisa Anggaran |
|---------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| <b>51 Belanja Pegawai</b> | -             | -              | -          | -             |
| <b>52 Belanja Barang</b>  | 1.552.865.000 | 1.068.044.464  | 68.78%     | 484.820.536   |
| <b>53 Belanja Modal</b>   | -             | -              | -          | -             |
| <b>Total</b>              | 1.552.865.000 | 1.068.044.464  | 68.78%     | 484.820.536   |

---

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

---

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran D4.2 (parsial) sebesar Rp 74.510.029. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 68.009.800,- sehingga memiliki deviasi sebesar -6,500,229 atau 9,56 %.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D4.2 adalah 100% yang telah ditayangkan.
3. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya pada indikator Sasaran Program Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri, hal ini disebabkan:
  - a. Clearing House masih bersifat himbauan dari LKPP.
  - b. Masih banyak pemda yang belum terdorong untuk membentuk Clearing House yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri.
  - c. Masih terdapat Pemda yang hanya memenuhi indikator Clearing House ataupun Probitiy/Konsolidasi saja.
4. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan clearing house dan Rincian Output Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House terdapat beberapa permasalahan yaitu:
  - a. Masih kurangnya kesadaran pemangku kepentingan Pemda terkait pentingnya clearing house untuk diterapkan pada Pemda;
  - b. Masih terdapat keengganan dari Pemda untuk melaksanakan clearing house karena masih belum ada perhitungan angka kredit untuk Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan kegiatan clearing house;
  - c. Keterbatasan anggaran Pemda dalam melaksanakan kegiatan clearing house.
5. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice terdapat beberapa permasalahan yaitu:
  - a. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan K/L/Pemda belum sepenuhnya mempertimbangkan konsolidasi pengadaan;
  - b. Pada tahap penyusunan anggaran Pemda belum mempertimbangkan adanya potensi paket-paket yang dapat dilakukan konsolidasi pengadaan;
  - c. Adanya kendala intervensi dalam pelaksanaan konsolidasi di pemda;
  - d. Masih terdapat beberapa Pemda yang belum terbuka dalam pendampingan *probitiy advice*.
6. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya pada indikator Rincian Output Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ terdapat beberapa permasalahan yaitu:
  - a. Terdapat keterbatasan produk PDN dan UMK;

- b. Masih terdapat kenyamanan menggunakan produk non PDN dan anggapan produk non PDN lebih baik dari produk PDN;
- c. anggapan produk non PDN lebih baik dari produk PDN.

---

#### D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Terhadap indikator Sasaran Program Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri:
  - a. Perlu dibuat *funneling* yang dapat memberikan data dan/atau informasi perihal progres pemenuhan kriteria *Probity*/Konsolidasi di masing-masing K/L/Pemda;
  - b. Membuat skala prioritas K/L/Pemda dan menyusun strategi pemenuhan kriteria *Probity*/Konsolidasi;
  - c. Bilamana diperlukan dapat bermitra dengan beberapa kementerian/lembaga seperti KPK, Kemendagri, BPKP atau kementerian/lembaga lainnya untuk mendorong pelaksanaan konsolidasi atau *probity*.
4. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan clearing house dan an Rincian Output Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House:
  - a. Melibatkan Pemda yang telah berhasil dalam melaksanakan clearing house (sebagai *success story*) agar menarik minat Pemda lainnya dalam turut serta melaksanakan clearing house;
  - b. Berkoordinasi dengan D3.1 agar pelaksanaan *clearing house* dapat dipertimbangkan dalam perhitungan angka kredit atau penilaian kinerja pada jabatan fungsional PBJ;
  - c. Mengoptimalkan anggaran, sumber daya, dan teknologi informasi yang ada di internal D42 guna membantu kebutuhan Pemda yang berpotensi melaksanakan clearing house.
5. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *probity advice*:
  - a. Penyelenggarakan kegiatan seperti sosialisasi, workshop, dan sejenisnya agar meningkatkan pemahaman Pemda terhadap pentingnya konsolidasi PBJ;

- b. Melibatkan K/L/Pemda yang telah berhasil dalam melaksanakan konsolidasi agar menarik minat K/L/Pemda lainnya yang berpotensi untuk melaksanakan konsolidasi;
  - c. Melibatkan pihak lain atau institusi lainnya dalam implementasi konsolidasi atau probity advice seperti KPK, Kemendagri, atau BPKP.
- 6. Terhadap indikator Rincian Output Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ adalah mendorong peningkatan jumlah dan kualitas produk PDN dan UMK kepada pemangku kepentingan seperti Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM, dan berkoordinasi dengan direktorat terkait di LKPP.
- 7. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
- 8. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres yaitu:
  - a. Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan *clearing house* dengan target 80 pemda.
  - b. Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *probity advice* dengan target 50 pemda.
  - c. Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan *Clearing House* dengan target 80 pemda.
  - d. Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ dengan target 50 pemda.

## 2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 14 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| <b>1.</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                                       |                                                                                  |                      |                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| No        | Sasaran Kegiatan                                                              | Indikator                                                                        | Target 2023          | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.        | 04-Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak | 01-Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan layanan LPS                       | 45<br>K/L/Pemda      | <b>45<br/>K/L/Pemda</b>            |
|           |                                                                               | 02-Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan                    | 40<br>APIP/K/L/Pemda | <b>40<br/>K/L/Pemda</b>            |
|           |                                                                               | 03-Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli | 10 Provinsi          | <b>8 Provinsi</b>                  |
|           |                                                                               | 04-Jumlah Perkara/Permasalahan PBJP yang terlayani                               | 300 Perkara          | <b>288 Perkara</b>                 |

 Keterangan:  
Target telah tercapai

| <b>2.</b> | <b>Rincian Output</b>                                                                                                    |             |                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| No        | Rincian Output                                                                                                           | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.        | 431-Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk                                               | 2 Orang     | <b>Progres : 97 %</b>              |
| 2.        | 432-Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk                                                            | 45 Orang    | <b>Progres : 100 %</b>             |
| 3.        | 431-Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani                                                                      | 300 Perkara | <b>288 Perkara</b>                 |
| 4.        | 432-Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS                                                                 | 25 Perkara  | <b>17 Perkara</b>                  |
| 5.        | 431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak | 9 Lembaga   | <b>7 Lembaga</b>                   |

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.3 pada bulan Oktober 2023 adalah 87,8%.

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>3.</b> | <b>Komponen</b> |
|-----------|-----------------|

Tahun 2023, D4.3 memiliki 14 Komponen dari 5 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 88,5%.

---

## B. Capaian Kinerja Anggaran

---

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran D4.3 TA 2023 adalah sebesar Rp1.820.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)        | Realisasi (Rp)   | Persentase | Sisa Anggaran  |
|--------------------|------------------|------------------|------------|----------------|
| 51 Belanja Pegawai | -                | -                | 0%         | -              |
| 52 Belanja Barang  | 1.610.000.000,00 | 1.077.448.974,00 | 66.92%     | 532.551.026,00 |
| 53 Belanja Modal   |                  |                  | 0%         |                |
| <b>Total</b>       | 1.610.000.000,00 | 1.077.448.974,00 | 66.92%     | 532.551.026,00 |

---

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

---

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran D4.3 (parsial) sebesar 76.025.625. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 163.792.470 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp 87.766.845 atau -53,58%
2. Persentase Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah sebesar 88.57% telah ditayangkan.

---

## D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.

5. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
  - a. Sasaran Kegiatan 04-Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak pada indikator berikut:
    - 1) Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli dengan target 10 Provinsi, dan
    - 2) Jumlah Perkara/Permasalahan PBJP yang terlayani dengan target 300 perkara.
  - b. RO Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk dengan target 2 Orang,
  - c. RO Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk dengan target 45 Orang,
  - d. RO Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani dengan target 300 Perkara,
  - e. RO Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS dengan target 25 Perkara, dan
  - f. RO Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak dengan target 9 Lembaga.

## 2.15 INSPEKTORAT

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023 Inspektorat memiliki 9 indikator Sasaran Kegiatan, 1 indikator Rincian Output, dan 4 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. Sasaran Kegiatan |                                                |                                                                                 |                     |                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| No                  | Sasaran Kegiatan                               | Indikator                                                                       | Target 2023         | Realisasi/Progres s.d Oktober                   |
| 1.                  | 01-Terwujudnya penguatan pengawasan organisasi | 01-Indeks Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal        | Predikat: Memuaskan | Realisasi : Skor 3,45 predikat sangat memuaskan |
|                     |                                                | 02-Survei Penilaian Integritas                                                  | Predikat: Memuaskan | Progres : 83 Persen                             |
|                     |                                                | 03-Pendampingan Unit Organisasi LKPP dalam Pembangunan Zona Integritas          | 4 Unit Organisasi   | 5 Unit Organisasi                               |
|                     |                                                | 04-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP | 80 Persen           | 82,3 Persen                                     |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator                                                                                              | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
|    |                  | 05-Persentase Pelaporan Wajib Lapor LHKPN                                                              | 100 Persen  | 100 Persen                    |
|    |                  | 06-Persentase Pelaporan Wajib Lapor LHKASN                                                             | 100 Persen  | 100 Persen                    |
|    |                  | 07-Level kapabilitas Inspektorat LKPP                                                                  | Level 3     | Level 3*                      |
|    |                  | 08-Persentase Pemenuhan Unit Organisasi yang mendapatkan kegiatan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT | 90 Persen   | 100 Persen                    |
|    |                  | 09-Persentase Penanganan Pengaduan                                                                     | 100 Persen  | 100 Persen                    |

\*) Realisasi masih menggunakan tahun 2022 dikarenakan indikator tersebut masih berprogres

 Target telah tercapai

| <b>2. Rincian Output</b> |                            |             |                               |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| No                       | Rincian Output             | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1.                       | 965-Layanan Audit Internal | 12 Dokumen  | Progres: 83 Persen            |

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan Oktober 2023 adalah 83%.

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>3. Komponen</b> |  |
|--------------------|--|

Tahun 2023. Inspektorat memiliki 4 Komponen dari 1 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 83%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran Inspektorat TA 2023 adalah sebesar Rp850.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)   | Realisasi (Rp) | Persentase | Sisa Anggaran |
|--------------------|-------------|----------------|------------|---------------|
| 51 Belanja Pegawai | -           | -              | 0%         | -             |
| 52 Belanja Barang  | 665.080.000 | 547.982.364    | 82.39%     | 117.097.636   |
| 53 Belanja Modal   | -           | -              | 0%         | -             |
| <b>Total</b>       | 665.080.000 | 547.982.364    | 82.39%     | 117.097.636   |

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, realisasi anggaran Inspektorat (parsial) sebesar Rp56.365.596. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp45.091.472, sehingga memiliki deviasi sebesar Rp11.274.124 atau 25,00%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Inspektorat adalah 127,80%.
3. Seluruh indikator pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya penguatan pengawasan organisasi telah tercapai.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu RO Layanan Audit Internal dengan target 12 dokumen.

## 2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

### A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) memiliki 2 indikator sasaran kegiatan, 7 indikator Rincian Output, dan 19 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. Sasaran Kegiatan |                                                                                                              |                                                                                                      |             |                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| No                  | Sasaran Kegiatan                                                                                             | Indikator                                                                                            | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1.                  | 04-Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui pelatihan dan pembelajaran yang inovatif dan bermutu | 01-Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi | 65 Persen   | 53,78 Persen                  |
|                     |                                                                                                              | 02-Persentase peningkatan kualitas pelatihan                                                         | 71 Persen   | 81,38 Persen                  |

 Target telah tercapai

| 2. Rincian Output |                                                                          |             |                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| No                | Rincian Output                                                           | Target 2023 | Realisasi/Progres s.d Oktober |
| 1.                | 511-LPPBJ yang Terakreditasi                                             | 80 Lembaga  | 78 Lembaga                    |
| 2.                | 511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ                                  | 6 NSPK      | 1 NSPK<br>Progres: 80 Persen  |
| 3.                | 512-Pedoman Pelatihan PBJ                                                | 3 Pedoman   | Progres:<br>80 Persen         |
| 4.                | 511-Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 5 Paket     | Progres:<br>80 Persen         |
| 5.                | 511-Peserta Pelatihan PBJ Teknis                                         | 1.491 Orang | 21762 Orang                   |
| 6.                | 512-Peserta Pelatihan PBJ Fungsional                                     | 805 Orang   | 1821 Orang                    |
| 7.                | 512-Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJP                       | 2 Laporan   | Progres:<br>85 Persen         |

 Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Puslat PBJ pada bulan Oktober 2023 adalah 85%.

### 3. Komponen

Tahun 2023, Puslat PBJ memiliki 19 Komponen dari 7 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 79,16%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran Puslat SDM PBJ TA 2023 adalah sebesar Rp3.994.680.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | Persentase   | Sisa Anggaran        |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 51 Belanja Pegawai |                      |                      | 0%           |                      |
| 52 Belanja Barang  | 3.482.086.000        | 2.240.793.150        | 64.35%       | 1.241.292.850        |
| 53 Belanja Modal   | 507.946.000          | 228.858.200          | 45.06%       | 279.087.800          |
| <b>Total</b>       | <b>3.990.032.000</b> | <b>2.469.651.350</b> | <b>61.9%</b> | <b>1.520.380.650</b> |

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdiklat di bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023 realisasi penyerapan anggaran Puslat SDM PBJ (parsial) adalah sebesar Rp200.014.495 realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp605.701.798 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp405.687.303 atau minus 66.98%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Puslat SDM PBJ telah 100,22%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat realisasi rincian output (RO) yang sudah melebihi target, yaitu:
  - a. Peserta Pelatihan PBJ Teknis dengan target 1.491 orang, realisasi 21762 orang (capaian 1459,55%).
  - b. Peserta Pelatihan PBJ Fungsional dengan target 805 orang, realisasi 1821 orang (capaian 226,21%).
4. Pada RO LPPBJ yang Terakreditasi, persentase capaian belum selaras dengan penyerapan karena anggaran pembaharuan izin akreditasi belum terserap.
5. Pada komponen Penyusunan Laporan, terdapat beberapa LPPBJ yang terlambat dalam mengumpulkan laporan pelaksanaan pelatihan dan tidak mencantumkan nama fasilitator dalam *e-learning*.

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. Mengusulkan perubahan target terhadap RO yang realisasinya jauh melebihi target, karena akan berpengaruh terhadap pelaporan ke pihak eksternal.
5. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
  - a. Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi dengan target 65 Persen.

- b. LPPBJ yang Terakreditasi dengan target 80 Lembaga.
- c. Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ dengan sisa target 5 NSPK.
- d. Pedoman Pelatihan PBJ dengan target 3 Pedoman.
- e. Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan target 5 Paket
- f. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJP dengan target 2 Laporan

## 2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI

### A. Capaian Kinerja Fisik

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

| 1. Sasaran Kegiatan |                                                                       |                                                                                                                  |              |                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| No                  | Sasaran Kegiatan                                                      | Indikator                                                                                                        | Target 2023  | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1                   | 04-Meningkatnya layanan dan sistem informasi yang andal dan responsif | 01-Persentase sistem informasi terintegrasi yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang proses bisnis internal LKPP | 72,73 Persen | 61 Persen                          |

| 2. Rincian Output |                                                                          |                    |                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| No                | Rincian Output                                                           | Target 2023        | Realisasi/Progres s.d Oktober 2023 |
| 1.                | 963-Layanan Data dan Informasi                                           | 3 Layanan          | Progres: 83%                       |
| 2.                | 963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP                                 | 1 Layanan          | Progres: 67%                       |
| 3.                | 963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | 16 Unit            | Progres: 67%                       |
| 4.                | 963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                    | 9 Sistem Informasi | Progres: 67%                       |

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusdatin pada bulan Oktober 2023 adalah 71%.

| 3. Komponen |  |
|-------------|--|
|-------------|--|

Tahun 2023, Pusdatin memiliki 9 Komponen dari 4 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 72,33 %.

---

## B. Capaian Kinerja Anggaran

---

Berdasarkan revisi anggaran ke-20, pagu anggaran Pusdatin TA 2023 adalah sebesar Rp7.323.882.000,00 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Oktober 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)     | Realisasi (Rp) | Persentase | Sisa Anggaran |
|--------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 51 Belanja Pegawai | -             | -              | 0%         | -             |
| 52 Belanja Barang  | 6.072.682.000 | 2.234.449.246  | 36.8%      | 3.838.232.754 |
| 53 Belanja Modal   | 1.251.200.000 | 741.825.514    | 59.29%     | 509.374.486   |
| Total              | 7.323.882.000 | 2.976.274.760  | 40.64%     | 4.347.607.240 |

---

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

---

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023 realisasi penyerapan anggaran Pusdatin (parsial) adalah sebesar Rp737.519.176 realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.200.406.775 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp462,887,599 atau -38,56%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pusdatin adalah 91.67% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Pengembangan aplikasi e-Office terhambat dikarenakan adanya *Information Technology Security Assessment (ITSA)*.

---

## D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.

4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
5. Memastikan bahwa setiap komponen aplikasi mematuhi standar keamanan yang ditetapkan.
6. Memperhitungkan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober, pimpinan unit organisasi perlu melakukan akselerasi terhadap kegiatan dan penyerapan anggaran pada indikator kinerja yang masih dalam progres, yaitu:
  - a. Persentase sistem informasi terintegrasi yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang proses bisnis internal LKPP dengan target 72,73 Persen.
  - b. Layanan Data dan Informasi dengan target 3 Layanan.
  - c. Layanan Data Warehouse Walidata LKPP dengan target 1 Layanan.
  - d. Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target 16 Unit.
  - e. Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan target 9 sistem informasi.

### BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Oktober 2023, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pagu anggaran awal LKPP tahun 2023 sebesar Rp200.222.132.000. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu RI nomor S-456/AG/AG.4/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Hal Pengesahan Revisi Anggaran LKPP TA 2023 (Revisi ke-6/Realokasi Automatic Adjustment) pagu LKPP di bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp187.144.450.000.
2. Penyerapan LKPP (kumulatif) sampai dengan bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp126.670.101.011 (67,69%) yang terdiri dari:

| Jenis Belanja      | Pagu (Rp)              | Realisasi              |               | Sisa Anggaran (Rp)      |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|                    |                        | Nominal (Rp)           | %             |                         |
| 51 Belanja Pegawai | 54.559.162.000         | 42.624.878.339         | 78,13%        | 11.934.283.661          |
| 52 Belanja Barang  | 115.903.116.000        | 71.195.096.940         | 61,43%        | 44.708.019.060          |
| 53 Belanja Modal   | 16.682.172.000         | 12.850.125.732         | 77,03%        | 3.832.046.268           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>187.144.450.000</b> | <b>126.670.101.011</b> | <b>67,69%</b> | <b>Rp60.474.348.989</b> |

3. Pada bulan Oktober 2023 realisasi anggaran LKPP (parsial) sebesar Rp11.446.131.367 realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan Oktober 2023 sebesar 16.677.098.306 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp5,230,966,939 atau -31.37%.
4. Unit organisasi yang memiliki deviasi RPD masih dalam ambang batas ( $\pm 5\%$ ) adalah Biro Perencanaan dan Keuangan (Belanja Pegawai) sedangkan unit organisasi lainnya memiliki deviasi RPD di luar ambang batas ( $\pm 5\%$ ).
5. Sampai dengan bulan Oktober 2023, LKPP telah membuat kontrak/komitmen sebanyak 103 paket dengan total nilai kontrak yaitu sebesar Rp35.100.577.025 dimana terdapat 72 kontrak yang telah selesai dibayarkan sehingga masih terdapat 31 kontrak dengan nilai sisa sebesar Rp2.994.549.258.
6. Pada tahun 2023 pagu pengadaan LKPP sebesar Rp 132.585.288.000 (71%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 4 November 2023, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp130,179,823,710 atau sebesar 89,90%. Masih terdapat Rp14,633,146,290 (8,46%) yang belum diumumkan melalui aplikasi SiRUP.
7. Nilai IKPA LKPP bulan Oktober 2023 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 93,82.

8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan 22 November 2023 adalah sebesar 69,94 nilai tersebut termasuk kedalam kategori Cukup.
9. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:
  - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
  - b. Mencermati dan segera meng-update pengumuman RUP di SiRUP untuk unit organisasi yang penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaan;
  - c. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan komponen);
  - d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan
  - e. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Oktober 2023.

